



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH

RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KEPALA BNP2TKI

- Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : III
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Kepala BNP2TKI
Hari, Tanggal : Selasa, 14 April 2015
Waktu : 10.45 WIB – 16.55 WIB
Tempat : R. Rapat Komis IX DPR RI
Ketua Rapat : **H. Asman Abnur, SE.,M.Si**
Sekretaris Rapat : Muh. Yus Iqbal, SE
Acara : 1. Progres kegiatan yang dilakukan oleh BNP2TKI terkait :
a. Pengurangan biaya penempatan bagi CTKI terutama dalam mereview *cost structure* dan penghapusan beban biaya yang harus dikeluarkan TKI.
b. Pendataan jumlah CTKI atau TKI dan PPTKIS di dalam dan di luar negeri melalui kerja sama instansi lain.
c. Optimalisasi dan pemberdayaan pelayanan, penempatan dan perlindungan TKI pada tataran pemerintah daerah.
d. Perlindungan TKI melalui sistem asuransi BPJS Ketenagakerjaan sesuai Amanat Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang BPJS.
2. Meminta penjelasan tentang pengawasan terhadap pelayanan *one get system* dan integrasi data penempatan dan perlindungan TKI melalui *online system* terintegrasi dengan pemangku kepentingan dan instansi lain
- Hadir : 33 Anggota

PIMPINAN :

1. Dede Yusuf Macan effendi, S.T, M.I.Pol (F-PD)
2. H. Syamsul Bachri, M.Sc (F-PG)
3. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si (F-P.Gerindra)
4. H. Asman Abnur, SE.,M.Si (F-PAN)
5. Dra. Hj. Ermalena, MHS (F-PPP)

F.PDIP :

6. Hj. Elva Hartati, S.IP, MM
7. dr. Ribka Tjiptaning
8. Daniel Lumban Tobing
9. H. Imam Suroso, S.Sos, SH, MM
10. Abidin Fikri, SH
11. dr. Karolin Margret Natasa

F.PG :

12. Hj. Dewi Asmara, SH, MH
13. drg. Hj. Andi Fauziah Pujawatie Hatta, SKG

F.P.GERINDRA :

14. Khaidir
15. Susi Syahdonna Bachsin, SE, MM
16. Roberth Rouw.

F.PD :

17. Drs. H. Zulfikar Achmad
18. Siti Mufattahah. Psi
19. Drs. Ayub Khan.
20. dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang
21. Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE

F.PAN :

22. Ir. H. A. Riski Sadig.
23. Dr. H.M. Ali Taher Parasong, SH, M.Hum

F.PKB :

24. H. Handayani, SKM
25. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA
26. Dra. Hj. Siti Masrifah, MA

F.PKS :

27. Drs, H. Hamid Noor Yasin, MM

F.PPP :

28. H. Muhammad Iqbal, SE, M.Com
29. Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si.

F.P.NASDEM :

30. Irma Suryani Chaniago, SE

31. Ir. Ali Mahir, MM
32. Amalia Anggraini

F.P. HANURA :

33. Capt. Djoni Rolindrawan, SE.,M.MAR, MBA

ANGGOTA IZIN/SAKIT :

1. Nursuhud
2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt

UNDANGAN :

1. Nusron Wahid, S.S (Kepala BNP2TKI) beserta jajaran.

RAPAT DIBUKA PUKUL 10:45 WIB

KETUA RAPAT (F-PAN/H. ASMAN ABNUR, SE.,M.Si) :

Pak Kepala BNP2TKI beserta seluruh jajaran.

Pimpinan Komisi IX DPR RI dan Rekan-rekan Komisi IX DPR RI.

Di meja Pimpinan baru lebih kurang 8 Fraksi yang hadir, yang menandatangani maka dari itu sesuai dengan Tatib kita belum bisa memulai namun kita skors 5 menit Pak Kepala, nanti setelah 5 menit kita langsung mulai, biasanya Teman-teman kalau sudah bunyi *assalamu'alaikum* mereka pada turun dari kandangnya insyAllah. Jadi, kita buka dan kita skors 5 menit.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)

(RAPAT DISKORS 5 MENIT)

Terima kasih.

Bissmillahirrahmanirrahim,

Skors saya cabut kembali kita mulai ya.

(SKORS DICABUT)

**Yang saya hormati Pak Kepala Badan BNP2TKI dan seluruh jajaran.
Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX DPR RI yang saya hormati.**

Hari ini kita Rapat Dengar Pendapat ya, mungkin yang ketiga ya Pak, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini nanti berjalan lancar. Pertama-tama, tentu kita senang kembali bertemu disini mengucapkan syukur *alhamdulillah* kepada Allah SWT. Terus selanjutnya ada beberapa hal yang akan kita bahas pada hari ini yaitu :

1. Progres kegiatan yang dilakukan oleh BNP2TKI terkait :
 - a. Pengurangan biaya penempatan bagi CTKI terutama dalam mereview *cost structure* dan penghapusan beban biaya yang harus dikeluarkan TKI.
 - b. Pendataan jumlah CTKI atau TKI dan PPTKIS di dalam dan di luar negeri melalui kerja sama instansi lain.
 - c. Optimalisasi dan pemberdayaan pelayanan, penempatan dan perlindungan TKI pada tataran pemerintah daerah.
 - e. Perlindungan TKI melalui sistem asuransi BPJS Ketenagakerjaan sesuai Amanat Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang BPJS.
2. Meminta penjelasan tentang pengawasan terhadap pelayanan *one get system* dan integrasi data penempatan dan perlindungan TKI melalui *online system* terintegrasi dengan pemangku kepentingan dan instansi lain.

Nah, untuk itu kita sepakati dulu sampai jam 4 ya Pak Kepala ya? Nanti kalau kurang kita tambah. Nah, untuk menghemat waktu saya langsung saja silakan Bapak memberikan paparannya dan selanjutnya akan kita dalam bersama-sama. Untuk itu waktu saya persilakan.

KEPALA BNP2TKI (NUSRON WAHID) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Bapak-bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX DPR RI yang kami hormati dan kami banggakan.

Pertama-tama, kami mengucapkan puji syukur *alhamdulillah* pada hari ini bisa memenuhi undangan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian RDP atau Rapat Dengar Pendapat antara BNP2TKI dengan Bapak-bapak, Ibu sekalian di Komisi IX DPR RI. Baik, karena pertanyaannya sudah spesifik yang dibahas, yang pertama masalah *cost structure atau review structure*, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang tidak plek seperti apa yang diminta oleh Bapak, Ibu sekalian tetapi secara substansi akan kami jelaskan apa yang selama 3 bulan ini telah kami lakukan sesuai dengan pokok-pokok pembahasan yang dimintakan oleh Bapak, Ibu sekalian Komisi IX DPR RI dan keterkaitan dengan konsep dan apa yang kami lakukan pada masa-masa yang akan datang dan pada tahun ini dan tahun depan.

Pertama, soal struktur biaya atau *cost structure*, saat ini memang ada semacam kayak asimetrik informasi atau informasi yang tidak utuh dan tidak seimbang mengenai struktur biaya perekrutan dan sumber pendanaan atas biaya rekrutmen tersebut. Jadi, antara yang di Indonesia dengan diluar negeri ini tidak seimbang informasinya, antara majikan dan antara pekerja ini sama-sama merasa tidak mengeluarkan biaya tetapi tidak jelas peruntukkannya dan ini sesuai dengan karakter pada sektor jasa dimana-mana apalagi termasuk di pasar input tenaga kerja karakternya secara ekonomi adalah asimetrik informasi dan mungkin Pak Daniel Tobing tahu dimana ada asimetrik informasi, dipastikan akan ada *moral hazard*, dipastikan selama ada asimetrik informasi termasuk dalam industri keuangan juga sama juga asimetrik informasi pasti akan ada *moral hazard*, tugas pemerintah baik di level kebijakan maupun di level operator adalah mengurangi sisi-sisi asimetrik informasi itu dalam bentuk *disclose* informasi, membuka semua informasi yang ada kepada publik, terutama kepada majikan dan juga terutama kepada pekerja sehingga antara pekerja ini *balance* informasinya, ini tentang biaya dulu. Nah, karena ketidakjelasan antara ini maka sesungguhnya biaya ini akan ditanggung oleh majikan atau ditanggung oleh TKI secara utuh masih terjadi simpang siur, akibatnya apa? Ada tumpang tindih dan ada dobel biaya, biaya yang sudah ditanggung dikeluarkan oleh majikan, karena tidak diinformasikan TKI, TKI masih dimintai lagi, yang ujung-ujungnya adalah terjadi asimetrik ekspektasi juga, setelah asimetrik informasi ada asimetrik ekspektasi, *bagi majikan mengatakan karena saya sudah mengeluarkan uang banyak kok kualitasnya tidak sesuai?* Bagi TKI mengatakan *kok saya sudah mengeluarkan uang banyak kok saya diminta bekerja diluar over time dan sebagainya*, karena ada *miss* informasi, *miss* ekspektasi, letaknya dimana nanti kami sampaikan, akibatnya adalah ada pemanfaatan oleh pihak

ketiga dengan tidak adanya ketidakjelasan apakah majikan membayar biaya rekrutmen sebagai beban utang kepada TKI atau kewajiban untuk membayar?

Nah, kemudian yang kelima adalah ketentuan *fee* terkait perusahaan penyalur. Ini terlalu kecil, ini Bapak-bapak sudah terima bahannya disini, ini sebagai contoh karena yang masih menerapkan struktur biaya itu tinggal 4 Negara ini, yang lain tidak menerapkan struktur biaya, kalau orang mau berangkat ke Singapura majikan itu membayar kepada agensi di Singapura sebanyak antara 2000-2400 dollar singapura, tetapi pada sisi lain Pemerintah Indonesia masih menerapkan komponen *cost structure* kepada TKI, padahal majikan sudah membayar dan *cost* itu legal karena tertuang dalam SK Dirjen Bina Penta, karena legal itu maka harus dijalankan dan ongkos yang dikeluarkan TKI itu dihitung hutang, nanti akan ada potongan gaji, tidak semua potongannya, kalau Singapura itu selama 8 bulan, berapa persen dipotong selama 8 bulan untuk menutup pinjaman. Kalau di Malaysia ini saya bicara yang sektor informal dulu ya belum bicara yang formal, kalau di Malaysia saya kebetulan baru kemarin pulang Malaysia majikan itu membayar agensi di Malaysia antara 12.000 ringgit dengan asumsi yang 8000 ringgit dikirim ke Indonesia untuk agensi disini, untuk biaya-biaya tetapi komponen yang 1800 ringgit itu adalah komponen biaya TKI yang akan dipotong nanti oleh majikan, ini waktu kemarin di Malaysia.

Kemudian, kalau di Taiwan itu juga sama majikan itu membayar antara 15000 sampai 30.000 MT dan di Taiwan ada *cost structure* juga yang jumlahnya adalah 17.770.000, di Hongkong juga sama, ini datanya begitu. Nah, kalau dirupiahkan saya tidak menyampaikan kompenennya disini, ini reviewnya saja, nanti kalau diminta kompenennya dan sesi tanya jawab mungkin kami bisa sampaikan, kompenennya apa saja, angka-angka itu untuk apa saja dan sebagainya, kalau dirupiahkan begini ini untuk Taiwan yang formal, formal itu *blue* ..(*tidak jelas*)...orang kerja di pabrik bukan menjadi *domestik* ...(*tidak jelas*)..., itu dia *cost structure* nya kena 17.635.400,- nah dihitung hutang, bunganya 33% flat termasuk administrasinya itu, bunga dan administrasi, kalau dihitung efektif sama dengan 60,7%. Kemudian, kalau yang sektor informal itu hampir sama tetapi bunganya agak turun sedikit, Hongkong juga sama, ini saya jelaskan semua mekanismenya. Nah, kompenennya ada kalau mau diminta nanti kita jelaskan supaya lebih singkat.

Bapak, Ibu sekalian.

Kami menyampaikan siapa yang membiayai ini? Sampai hari ini komponen yang membiayai hutang itu belum ada satu pun Bank nasional yang masuk, saat ini yang main, yang masuk dalam lembaga keuangan pembiayaan ini ada 3 plus lembaga keuangan, satu Bank umum tetapi asing yaitu China Trust, ada 4 BPR, kemudian ada 8 Lembaga Keuangan dalam bentuk badan hukum koperasi simpan pinjam yang menerapkan ini. Kenapa ini dilakukan? Karena belum ada satu pun lembaga keuangan formal yang dibawah pengawasan otoritas jasa keuangan yang mau membiayai ini karena alasan dua hal, yang pertama adalah alasannya tidak ada jaminan dan *alhamdulillah* masalah jaminan ini berdasarkan hasil Rakor di Menko Perekonomian sekitar 1 bulan yang lalu untuk sektor TKI sudah masuk komponen prioritas pembiayaan dalam bentuk skema kredit

usaha rakyat sehingga *alhamdulillah* soal skema pembiayaan ini untuk jaminan sudah teratasi, setelah ada pembiayaan, ada jaminan, ada isu lain yaitu adalah isu tentang agensi *collection*, kenapa Bank belum mau masuk? Siapa yang mengkoleksi saya disana? Bagaimana mekanisme pembayarannya? Nanti kalau macet bagaimana, nah karena ada beberapa Bank yang pada Tahun 2001 dan 2002 waktu itu ketika Menteri Tenaga Kerjanya Pak Fahmi Idris itu pernah masuk dan terbakar sampai ratusan miliar, Bukopin pernah main disitu, Mandiri pernah main dan terbakar macet karena itu menjadi isu kemudian tarik diri, bagaimana solusinya tentang agensi *collection* ini? Nanti akan kami *propose*, kami telah *propose* dan menggunakan sudah kami introdukir pada 1 April kemarin dan kami sudah membuka pendaftaran dan membuat skema ekosistem yang baru sehingga nanti bisa masuk kesana.

Nah, ini soal *cost structure* dulu kami sampaikan dan kami sudah mengirim surat, karena ini dalam undang-undang masalah *cost structure* ini harus ditentukan oleh Menteri, kami sudah kirim surat pada tanggal 13 Desember 2014 untuk diadakan *review* pembahasan tentang *cost structure*, kami sudah *propose* dengan berbagai asumsi-asumsi yang ada, hasil kami mengadakan pertemuan *Three parted* antara pengusaha dalam arti agensi atau PPTKIS di Indonesia, perwakilan LSM TKI dan kami sendiri pemerintah, kami undang, Naker juga kami undang kemudian kami kirim surat dan sampai hari ini belum ada pembahasan pada level itu dan malah yang menginisiatif itu adalah Menko Perekonomian yang sangat aktif. Oke, ini bandel *cost structure review* nya selesai pada level ini.

Kemudian, pada poin yang kedua yaitu masalah pendataan TKI dan CTKI yang ada di luar negeri. Saya sudah paham ketika bicara masalah pendataan ini ada pertanyaannya adalah pada penanganan masalah *unprosedural*, ujung dari arah pertanyaan ini adalah *unprosedural* atau ilegal tanda petik, bukan kami bermaksud menyamakan Teman-teman buruh migran ini dengan barang ilegal tetapi untuk memperjelas istilah saja, bukan berarti kami setuju dengan istilah itu. Pertama, kita hari ini dihadapkan pada isu besar pada masalah pendataan yaitu masalah simpang siur data dan *online* data yang belum sempurna sehingga Bapak, Ibu sekalian hari ini kalau tanya tentang berapa jumlah TKI yang ada di Indonesia jawabannya beda-beda, di BNP2TKI beda, di Kemenaker beda, di Kemenlu beda, di Imigrasi juga beda, pintu poinnya ini harusnya 4 BNP2TKI, Menaker, Imigrasi dan Kemenlu. Kenapa ini dilakukan? Karena integrasi data ini baru terjadi pada Tahun 2014 yang melibatkan antara lain; BNP2TKI, Kemenaker, Imigrasi dan Kemenlu atau di perwakilan. Kenapa beda-beda? Salah satunya adalah satu, banyak sekali TKI yang berangkat tidak menggunakan visa kerja tetapi pertama adalah visa turis kemudian disana menggunakan *calling visa* atau CV visa, pada level ini siapa yang salah? Kalau pada level ini? Pada level ini adalah itikad baik, negara penempatan itu yang tidak ada pada level ini, pemerintah Indonesia pada level ini tidak bisa disalahkan, bukan kami bermaksud membela, orang niat mau turis mau apa? Kemudian, disana di *calling visa*, satu-satunya jalan bagaimana? Satu-satunya jalan adalah pemberdayaan atau Undang-Undang Imigrasi dilaksanakan yaitu momentum ketika orang sedang mengurus paspor kan dalam Undang-Undang Imigrasi diwajibkan untk wawancara verifikasi, momentum wawancaranya itu harus

dioptimalkan dan imigrasi harus dikasih hak orang yang dicurigai, tidak pantas menjadi turis kalau dia bekerja padahal dia bekerja diyakini itu tidak dipastikan keluar visa untuk itu tetapi pasti itu pemerintah atau imigrasi akan disuruh atas nama hak asasi manusia, siapa yang bisa memastikan meskipun dia penampilannya tidak perlehte bahwa dia dicurigai tidak mampu jadi turis, ini juga masalah pada level ini.

Nah, yang bisa kita lakukan hari ini baru dengan 2 Negara yaitu dengan Taiwan, bukan 2 Negara tetapi 2 tujuan, nanti kalau saya sebut Taiwan negara nanti saya diprotes sama Cina ini, yang satu adalah Taiwan, yang satu adalah Brunei Darussalam, Taiwan ada budi baik karena dia menyadari bahwa kalau terjadi TKI yang tidak kompeten dan tidak berkualitas akan menjadi ilegal disana, juga akan menimbulkan masalah, dia mengeluarkan kebijakan ada kesepahaman dengan kita, kalau ada permohonan visa kerja ke Taiwan harus mendapatkan *endorsement* dari BNP2TKI sehingga *clear*, bahkan Brunei lebih maju, Brunei di dalam set up komputernya sudah ada *link* dengan BNP2TKI, jadi yang diproses di dalam Brunei langsung di cek, dia sudah *link up* data didalam BNP2TKI sudah ada atau belum, kalau belum ada dibalikin, proses dulu, kalau sudah ada diurus tidak perlu surat menyurat kalau di Brunei, yang lain mohon maaf belum bisa, alasan otoritas negara yang lain, idealnya bagaimana? Idealnya adalah kalau ini *biddingnya* adalah Kemenlu membuat semacam pertemuan dengan para perwakilan-perwakilan negara dimana menjadi daerah tujuan penempatan, mewajibkan ada interkoneksi data cakep untuk memudahkan itu tetapi lagi-lagi itu sangat menyangkut dengan otoritas kenegaraannya masing-masing karena masalah interkoneksi ini adalah kedaulatan negara masing-masing, *ones*, minimal yang dilakukan Taiwan bagi kita sudah cukup, ini kalau kita bicara masalah pendataan supaya sama antara kepentingan data yang diluar negeri, data yang ada di BNP2TKI dan data yang ada di Kemenaker dan data yang di Kemenlu, data yang di BNP2TKI ini sistemnya sudah interkoneksi dengan kabupaten kota, jadi orang datang menjadi calon tenaga kerja di Banyuwangi sudah otomatis terecord disini, tinggal prosesnya bisa diikuti sehingga Bapak dan Ibu sekalian kalau seandainya hari ini ditanya ada berapa TKI yang daftar, kemudian kabur dan berangkat duluan, tidak ikut BLK, belum selesai sudah berangkat duluan kami bisa jawab selama dia daftar. Dalam pendaftaran harusnya dia ada fase, setelah daftar disini fase tes kesehatan, fase di BLK, ada fasenya. Tiba-tiba di cek BLK tertulis 300 orang, tinggal 10 orang kita pun tahu tetapi yang menjadi persoalan adalah hari ini kalau tidak tercatat, ini yang menjadi masalah.

Data based di BNP2TKI ini memuat 30 *item* didalamnya mulai dari biodata TKI, Paspor, dokumen kerja dan sebagainya semua itu termonitor disitu data-data termasuk kontrak dan lain sebagainya, termasuk Bapak, Ibu sekalian kalau hari ini tanya kepada kita, *ada berapa TKI yang habis kontrak pada bulan April 2015?* Kami bisa buktikan, sampai bulan Desember ada berapa, kami ada, alamatnya ada dimana dan sebagainya, selama alamatnya betul dan tidak palsu waktu *entry* data tersebut, sampai hari ini data yang terecord dalam sisco itu sudah mencapai hampir 3,2 juta tetapi *by name*, *by address*, tetapi kami yakin sesungguhnya Teman-teman TKI lebih banyak dari ini, orang menyebut 6,2 juta mungkin, data dari mana? Data dari Kemenlu 6,2 juta, dihitung darimana? Jumlah WNI yang

ata disana yang tidak mahasiswa, dihitung menjadi TKI, padahal mungkin juga tidak semua TKI.

Nah, ini badan alurnya, nah ini saya sampaikan kemudian Kementerian Lembaga yang terikat ada 13 dan kami berusaha sekuat tenaga pada bulan Juni supaya ada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) kecuali Imigrasi, minimal PTSP tahun ini akan kami jalankan di 2 tempat, 3 tempat termasuk NTB sudah jalan yaitu Surabaya sama Semarang sebagai percontohan, syukur-syukur Jawa Barat menyusul tetapi bisa NTB sudah bagus, bisa Semarang dan Surabaya sudah bagus. Tetapi masalahnya adalah disini Imigrasi sudah kirim surat kepada kami menolak untuk PTSP, alasannya adalah kami sudah punya sistem sintim sendiri, padahal kami berharap *ones* itu yang paling penting adalah Imigrasi karena potensi pintu lalu lintas keluar masuk adalah di Imigrasi, Kepolisian SKCK pun bersedia malah, yang kami duga sebelumnya agak berat mabas Polri ternyata malah bersedia. Jadi, orang urus SKCK tidak perlu lagi datang ke Polda atau Polres cukup di PTSP nanti sudah bisa, kami *re confirm* ketemu dengan Pak ...(*tidak jelas*)...bersedia memang, ini yang belum bersedia malah Imigrasi kirim surat resmi, ini datanya yang akan masuk di kita ini dan pada mulai 1 April kemarin sesuai dengan MoU kita dengan BI dan OJK dan sesuai dengan Permenaker No.22 Tahun 2015 semua pembayaran tentang *stakeholder* tentang TKI sudah dilakukan dalam bentuk non tunai per 1 April meskipun belum sempurna tetapi baru transaksi yang ada di Indonesia, belum transaksi yang ada di luar negeri, dalam arti gaji dari majikan kepada tenaga kerja belum non tunai, kita akan kejar supaya bisa non tunai.

Nah, kemudian masalah optimalisasi penempatan dan perlindungan poin ketiga.

Bapak, Ibu sekalian.

Saat ini yang *existing* saat ini model pelayanan dan services dari BNP2TKI, PJTKI atau PPTKIS atau kepada TKI melalui PPTKIS masih sekedar pelayanan dokumen pada *tracking tressing* dan sebagainya, karena itu tahun ini kami akan membuat percontohan model yang kita sebut dengan ESO (Employment Services Officer) mirip seperti AO kalau dalam dunia Bank atau AR kalau dalam dunia *account representative* kalau dunia pajak. Misalnya PT X dia dibawah ESONya siapa, jelas pengawasannya, kalau hari ini tidak, kita ada 517 semua orang bisa mengawasi atau tidak mengawasi 517 PPTKIS, nanti akan kita bagi PT ini dibawah pengawasan ini, PT ini dibawah pengawasan ESONya ini, PT ini dibawah ini, persis kepada kita-kita ini kalau urus pajak, Pak Daniel Tobing AOnya ini, Pak Asman Abnur AO, ARnya ini sehingga tidak bisa lain semua termonitor. Pada tahun ini kami baru mencoba untuk uji coba di 30 PPTKIS dulu untuk di 4 tempat yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya sama Semarang, di Jakarta 12 PPTKIS, di Bandung 6 PPTKIS, Semarang 6 PPTKIS, di Surabaya 6 PPTKIS itu dulu 30 PPTKIS. Kami mempunyai data dari 517 itu sesungguhnya yang kita sebut dengan kalau dalam dunia keuangan ada istilah *systematically important banking* yaitu 10 besar Bank yang itu menguasai aset 80% sehingga kalau Bank ini bermasalah ya bermasalah semua, kami mencoba merumuskan bahwa dalam dunia TKI ini hanya ada 120 dari 517 PPTKIS yang menguasai 80%, jadi kalau kita

tilik semua masalah TKI ya PT ini, daerahnya hanya 55 kabupaten kota, daerahnya, jadi kalau tanya masalah TKI paling banyak 55 daerah kota ini, kalau tidak Jawa Barat, kalau tidak Sukabumi, Cianjur, Karawang, Indramayu, Cirebon kemudian Purwakata, kalau di NTB kalau tidak Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa, kalau NTT misalnya Atambua, kemudian Belu, sudah data-data itu saja, kalau Sumatera Selatan itu Pare-pare, kalau di Jawa Tengah kalau tidak Cilacap, Brebes, Banyumas itu saja terus dibolak-balik 55 kabupaten kota, kalau PT nya 120, jadi sebenarnya pemerintah ini tidak usah pusing-pusing pegang 55 kabupaten kota, pegang 120 PT itu(rekaman terputus)...

Kami identifikasi, nah ini sedang kita buat kan hari ini tahapnya sampai mana kalau ditanya *review* sampai mana, esok tahapnya adalah tahap pelatihan SDM sama tahap penyusunan SOP, kenapa? Karena ini adalah pendelegasian kewenangan yang dulunya ada di kewenangan eselon 2 dan eselon 3 ditaruh kepada seorang ESO ini dimana ESO itu paling-paling pangkatnya maksimal hanya eselon 4 paling tinggi tetapi tanggung jawabnya berat disana. Kemudian, yang kedua untuk perlindungan kita ingin menerapkan *early warning system*, ada tiga poin *early warning system* yang ingin kita pakai, yang pertama, model penempatan semua Calon TKI sebelum berangkat wajib di upload biodatanya baik serta kompetensinya, misal nama Agustin lahir disini lengkap, kompetensinya dia apa ditampilkan. Sebaliknya agensi di luar negeri untuk bisa mendapatkan TKI dari Indonesia wajib juga mengupload biodata majikan gajinya berapa, pernah punya masalah atau tidak, kenapa selama ini tidak terjadi masalah karena salah satu tidak ada ...(*tidak jelas*)...*no your customer, no your client* di dalam bisnis TKI hari ini, siapa saja kadang-kadang orang belum jelas porsi majikannya siapa bisa mengambil TKI dari NTT sehingga sampai disana ngakunya dia orang kaya, ternyata tidak mampu bisa menggaji karena tidak ada *kuaisi*, kita ingin dalam *early warning system* ini nanti semua biodata di upload dalam website, semua majikan di upload dari website dan bisa diakses secara umum sehingga ada *disclose* informasi, keterbukaan informasi disini, ini EWS yang pertama.

EWS yang kedua, semua TKI nanti sebelum berangkat kami sudah bekerja sama dan mengundang provider Telkom untuk dibagikan satu kartu telepon gratis, syaratnya satu, nomernya Indonesia tetapi bisa berfungsi 2 nomer, jadi Telkom tersebut wajib mempunyai kerja sama dengan telepon disana, sejauh ini yang merespon 2, satu Telkomsel yaitu telintelkom dan yang satunya XL, membagi gratis.

Kemudian, yang kedua, mereka akan membuat satu situs khusus, aplikasi khusus untuk komunikasi disini sehingga kita hanya conten, semua diberikan gratis oleh perusahaan Telco tersebut, kartunya gratis dan di dalam, add nya gratis dan Telco ini, fasilitas ini dikasih *panic button*, untuk apa? Untuk *taking* keberadaan TKI itu ada dimana kalau dia ada laporan, hilang, dicari dan sebagainya tidak ada respon itu dicari di *tracking* lewat Telco ini bisa dan mereka memberikan fasilitas ini secara cuma-cuma kepada TKI dalam rangka *early warning system*, fungsinya untuk apa? Pertama, untuk *tracking* posisi, kedua untuk apa? Untuk komunikasi murah dan mudah, ketiga untuk apa? Untuk kalau ada apa-apa cepat kita handle pemerintah dan kami sudah koordinasikan dan sosialisasikan kepada perwakilan luar negeri, mereka bahagia semua dengan adanya

model ini dan ini akan percontohan tiga tempat ini, pertama adalah Hongkong, kedua adalah Malaysia dan ketiga adalah Arab Saudi bahkan Telkomsel menawarkan Gapari-gapari diluar negerinya itu dijadikan krisis centre TKI, pusat informasi pengaduan TKI disitu kerja sama dengan KBRI dan KJRI, nanti Bapak, Ibu sekalian kalau ada kunjungan disana memperlihatkan bagaimana keseriusan Teman-teman Telkom ini untuk menyiapkan service itu semua, saya kasih target mereka 1 Juli harus *running*, kemarin coba di Malaysia sudah mulai jalan, sudah mulai persiapan, di Arab Saudi bahkan di Mekkah dia buat itu di Hotel Grand Zamzam sekaligus pelayanan jamaah sekaligus itu TKI ada disana, dia buat pusat informasi yang satu jamaah haji dan umroh dan yang satunya TKI dibuat satu tempat disitu dan kita minta jangan di satu tempat kalau bisa jangan hanya di Mekkah tetapi di Jeddah, Ryadh dibuat juga.

Lah ini modelnya begini, nah ini *templand* kerjanya ini diharapkan nanti mulai bulan Juli sudah bisa jalan, Desember kita evaluasi terus model-model pelaksanaannya. Nah, kemudian masalah mediasi dan advokasi, kami sedang melakukan perbaikan internal yaitu masalah krisis center dengan SLE (Service Level Agreement) yang baik, Bapak, Ibu sekalian, saya mohon maaf memang saat ini kami akui pengaduan calling centre dan sebagainya kadang-kadang diangkat, dilayani tetapi tidak ada *follow up* hanya surat-surat dan sebagainya. Kami sadar semua pengaduan yang datang itu tidak mungkin menyelesaikan masalah tetapi sekarang kami sedang mencoba membenahi wajah *front line*, wajah terdepan dalam *calling center* itu wajahnya supaya wajah yang memuaskan termasuk mohon maaf orang tidak punya pun saya seleksi ulang supaya wajah yang tampil itu wajah yang tidak seram tetapi wajah yang menyenangkan, kalau yang tampil Pak Ali Taher Parasong pasti takut orang, mohon maaf Pak. Tetapi yang membuat orang begitu datang itu banyak bawa masalah minimal itu tersenyum, kami sadar yang paling penting kami tidak mampu menyelesaikan masalah TKI semua tetapi minimal mereka datang itu senang, ruangnya harus ada AC dulu, kemudian harus kopi, harus ada makanan, minuman meskipun sederhana itu dulu jangan sampai mereka datang mengeluh tambah suntuk nanti, nah ini kita lagi benahi, ini tidak ada teorinya tetapi harus disentuh ini tentang mediasi dan advokasi.

Nah, kemudian yang nomer empat, berkaitan dengan BPJS. Bapak, Ibu sekalian, kami sangat senang sekali kalau seandainya BPJS bisa masuk di dalam TKI, cuman yang jadi masalah kami juga sudah pernah konsultasi kepada OJK *dispute* pada masalah kepesertaan, menurut Undang-Undang BPJS katanya tetapi kalau saya baca sebenarnya tidak bahwa peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia, selama membayar iuran artinya kan orang asing yang bekerja di Indonesia kan hanya untuk orang asing artinya TKI pun boleh. Nah, tetapi dibandingkan dengan asuransi TKI yang hari ini, yang 13 *item* ini dibandingkan dengan BPJS, ini seandainya bisa di *combine* dengan iuran yang sama atau lebih murah kami lebih setuju BPJS, kenapa? Di BPJS ada jaminan hari tua sama ada pensiun, di asuransi TKI tidak ada jaminan hari tua dan tidak ada pensiun. Jadi, kalau Permenaker No.1 Tahun 2012 diubah kemudian tiga konsorsium TKI itu dibubarkan diganti BPJS mungkin saya orang yang paling *happy* dan senang untuk itu sepanjang kemudian

jaminannya ditambah, *coverage* asuransinya ditambah tidak hanya 5 tetapi yang 13 dimasukkan disini sehingga nambah. Saya yakin TKI nambah biaya meskipun sedikit tidak masalah tetapi kalau *coveragenya* ada dana pensiun sama dana jaminan hari tua. Pak, banyak sekali TKI ini waktu berangkat jual tanah, waktu pulang tanahnya saja belum balik lagi malahan mau berangkat lagi jual tanah lagi. Kalau ini bisa dimulai banyak yang bahagia, TKI banyak yang bahagia untuk ini, karena itu kami sangat dan sangat setuju kalau seandainya BPJS ini dan apalagi *item 2* itu 4, 5 itu yang paling saya incar yang 4, 5 itu jaminan hari tua dan pensiun, misalnya mantan TKI dapat pensiun 10-15 juta itu bisa digunakan modal awal untuk dia berusaha di dalam kampungnya dan sebagainya.

Nah, ini tentang klasifikasi PPTKIS jumlahnya 515, yang hijau 336 ini menurut Menaker, yang kuning 145, yang merah 34. Nah, kalau menurut klasifikasi kami, kami mencoba bagi Pak Asman, mungkin Pak Asman agak tertawa sedikit ini, kami ada tiga kategori Pak, ada buku 1, buku 2, buku 3, kayak hotel Pak ada bintang 1, bintang 2 dan bintang 3. Hotel bintang 3 berarti PPTKIS yang penempatannya diatas 1500 ada 21, ini harusnya jaminannya tinggi, yang penempatannya 500-1500 ada 106, yang penempatannya itu antara 100-500 ada 153 plus 27, yang penempatannya 1-100 itu ada 35 dan 36, yang tidak pernah melakukan penempatan sama sekali 72, menurut saya model begini harus dilikudasi, kami juga sudah kirim surat kepada Menteri karena ini semua ijin Menteri, supaya *...(tidak jelas)...*begini yang penempatannya itu masuk kategori buku 1, bintang 1 500 ke bawah depositonya 500 juta sesuai dengan undang-undang karena risikonya rendah. Yang penempatannya 500 sampai 1500 depositonya dinaikkan 1,5 miliar karena dia menjamin manusia banyak kalau ada apa-apa gimana, kalau diatas 1500 jaminannya dinaikkan menjadi 2 miliar supaya dia makin banyak menempatkan makin banyak resiko dia tanggung, dia sampai jaminan kalau ada apa-apa dia yang tanggung jawab, tidak lari seperti saat ini.

Ini yang waktu awal saya katakan layanan keuangan terpadu, kami sekarang sedang *beuty contess* dan pendaftaran hanya membolehkan lembaga keuangan itu masuk tidak hanya pembiayaan saja dan tidak hanya remitansi saja *.....(rekaman terputus).....* kami remitansi semua Bank ikut remitansi artinya apa? Hanya mau dagingnya saja Bank ini tetapi tidak mau tulangnya karena pembiayaan memang tulang, karena itu kami minta semua *...(tidak jelas)...* kalau ikut pembiayaan, ikut pembukaan rekening, ikut remitansi dan sebagainya sehingga nanti ke depan semua TKI mulai 21 Juni sebelum berangkat diwajibkan membuka rekening, karena kita paksa negara disana pembayaran lewat *cash less*, yang sudah respon adalah BRI, contohnya seperti ini langsung dikasih ATM, ini dari Korea dikasih ATM seperti ini, jadi devisa langsung masuk kesini Pak Asman karena langsung *cash less* tidak ada uang yang tersisa disana. Kemudian, *alhamdulillah* responnya luar biasa, sampai saat ini sudah.

Nah, ini ekosistem kerjanya seperti ini, ini sudah kita *propose* dan rapatkan di OJK dan *alhamdulillah* OJK mendukung dan merespon dan kalau sistem ini jalan kajian OJK dan BI mengatakan in shaa Allah kalau semua *cash less* termasuk gaji *cash less*, devisa kita atau remitansi kita akan naik 2 kali lipat sehingga kita seperti Filipina, kemarin kami tergelitik pernyataannya Pak Sofyan Djalil mengatakan rupiah turun karena TKI kita

rendah remitansinya, memang betul pada saat dollar menguat semua mata uang turun, satu negara yang mata regionalnya naik yaitu Peso Filipina, kenapa? Karena remitansinya dia adalah USD26,8 miliar, 10% dari total JPP dari TKI. Indonesia hari ini remitansi Tahun 2014 hanya USD8,37 miliar padahal jumlah TKI Indonesia dengan tenaga kerja Filipina di luar negeri lebih banyak Indonesia, kenapa? Karena TKI di Filipina yang pertama adalah *skill whole*, sudah ...(*tidak jelas*)...menggunakan ini semua.

Nah, yang terakhir yang kami ingin *propose* kepada Bapak dan Ibu sekalian, tahun ini kami akan melatih TKI bermasalah di 55 kabupaten kota, 15.000 orang dan untuk pelatihan ini kami mengundang semua mitra-mitra lokal dan model pelatihannya ini tidak sekedar pelatihan, biaya pelatihannya itu dari APBN, dari BNP2TKI tetapi syarat yang ikut terlibat melatih ini harus mencarikan *off taker*, jadi contoh ketika TKI pulang kita kasih dokumen *assessment*, anda kalau ingin usaha, usaha apa? Batik misalnya, si pelatih ini yang menjadi EO pelatihannya wajib mencarikan siapa nanti yang menjamin pembelian batik tersebut, ini sudah jalan kemarin di Garut pelatihan budidaya jamur, dibeli langsung jamurnya, besok lagi Kamis angkatan kedua jamur lagi di Banyubong, kami ingin mengundang Bapak, Ibu sekalian melalui Dapilnya yang bersangkutan silakan untuk dilihat, kami dengan senang hati, dilihat, disaksikan untuk diawasi, dipantau supaya berjalannya *proper* dan kita jamin yang ikut terlibat wajib mencarikan *off taker* tidak boleh sendiri-sendiri, ya mohon maaf saat ini kalau model pelatihan pemerintah kan abis pelatihan pasang spanduk begitu selesai kan? Nah, kita tidak mau, wajib mencarikan *off taker*, biayanya dari kami, pengembangannya dari CSR, mitra-mitra kami ada Telkom tadi yang bisnis di TKI, Bank-bank dan sebagainya ikut terlibat semua membantu.

Nah, lanjut kotanya 55 kabupaten kota, saya kira ini yang bisa kami sampaikan, ini sekedar mengingatkan kita bahwa *road map* kita ingin ini Pak 01234505, 0 itu artinya zero TKI informal pada tahun 2017, 1 itu artinya pra keberangkatan rata-rata biaya maksimal satu bulan gaji, dua bulan gaji biaya maksimal TKI artinya *feenya* itu *fee* agensi sana dan *fee* agensi maksimal dua kali maksimal gaji, kemudian remitansi TKI kita meningkat 3 kali lipat, perlindungan harus utuh di 4 tahapan yaitu pra keberangkatan, keberangkatan, penempatan dan pemulangan. Kemudian, TKI purna jalani lima solusi mandiri, ini yang ingin kita capai pada Tahun 2019 nanti itu ke arah sana. Saya kira cukup Pak, terima kasih, mohon di dukung dan kami mengundang Bapak, Ibu sekalian untuk bekerja sama, memonitor barang ini semua, pekerjaan ini semua secara bersama-sama.

Sekian.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam.

Luar biasa, sudah seperti CEOnya TKI ya Pak, biasanya CEOnya perusahaan, kalau ini CEOnya TKI.

Terima kasih Pak Kepala BNP2TKI.

Tadi sudah dijelaskan secara detail termasuk perbandingan Indonesia dengan Filipina, cuman memang kalau kita lihat diluar itu Pak sedih juga kita, kalau TKI kita tidak kelihatan, kelihatannya cuman Sabtu, Minggu terutama kalau di mal-mal atau di jalanan tetapi kalau TKI nya Filipina nampak di Airport, di receptionnya hotel termasuk yang di rumah sakit Pak, mereka nampak disitu dan semua Bahasa Inggrisnya lancar tetapi kalau TKI kita antara dua Pak bahasa jawa sama bahasa, kira-kira begitu, jadi ini memang tantangan ke depan kalau menurut saya CEO nya TKI ini.

Selanjutnya, saya persilakan kepada Teman-teman mohon, kita mulai dulu sebelah kanan silakan, Pak Hamid silakan sambil menunggu yang lain.

F-PKS (Drs. H. HAMID NOOR YASIN, MM) :

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore.

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang kami hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX DPR RI,
Yang kami hormati Pak Nusron Wahid selaku Kepala BNP2TKI beserta segenap jajarannya.**

Sebelumnya perkenalkan nama saya Hamid Noor Yasin dari Dapil Jawa Tengah IV Wonogiri, Sragen, Karang Anyar dari Fraksi PKS.

Pertama, kami memberikan apresiasi kepada Pak Kepala BNP2TKI atas paparannya dan semangatnya untuk memperbaiki tata kelola yang berkaitan dengan persoalan-persoalan CTKI dan TKI kita, baik itu mulai dari persiapan-persiapan rekrutmen kemudian penempatan dan kemudian perlindungan tadi belum banyak disinggung dan pemulangan juga belum banyak disinggung, mungkin nanti kami akan banyak menanyakan tentang itu.

Pak Kepala BNP2TKI, Mas Nusron yang saya hormati.

TKI kita ini mendatangkan devisa yang sangat besar bagi bangsa dan negara kita, akan tetapi kalau kita lihat di pemberitaan-pemberitaan masih banyak sekali kasus-kasus yang menimpa Saudara-saudara kita yang merupakan pahlawan devisa itu, hal ini disebabkan mulai dari proses rekrutmen sampai pemulangan, rekrutmen misalnya ini kalau di daerah-daerah disinyalir atau kasus-kasus masih banyak calo-calo yang bergerak di persoalan ini, nah ini mungkin ada beberapa kiat atau antisipasi yang dilakukan oleh Pak Nusron dan jajarannya apa yang dilakukan untuk mengantisipasi calo yang bergerak di sektor ini.

Kemudian yang kedua, setelah penempatan disana tentu yang perlu dioptimalkan adalah perlindungan TKI kita, masih banyak sekali persoalan-persoalan bahkan berdasarkan data yang kami himpun ini TKI kita yang menunggu eksekusi mati di Saudi misalnya masih ada 26 setelah yang terakhir kasus Ruyati kemarin, masih ada 26 TKI yang menunggu eksekusi mati kemudian di Malaysia misalnya masih ada 56 yang menunggu eksekusi mati, ini langkah-langkah perlindungan apa yang dilakukan oleh BNP2TKI terkait dengan warga kita yang ada disana.

Kemudian, persoalan pembiayaan, belum lama ini ramai di media misalnya kasusnya tenaga kerja kita yang ada di Taiwan Agustin misalnya di media banyak ramai biayanya kena 23 juta kemudian kasus yang lain kasusnya Samsudin, dia menyampaikan bahwa dialaminya saat tahun 2012 yang imbasnya sampai sekarang ketika akan bekerja ke Taiwan membayar 32 juta tunai bahkan setelah di Taiwan dikenakan potongan kurang lebih sekitar 4 juta itu untuk membayar *fee* agensi, kemudian medical check up, kemudian Askes di Taiwan, kemudian PRC bunga pinjaman sehingga jika ditotal potongan selama 2 tahun bekerja di Taiwan membayar potongan sebesar 96 juta ditambah 32 juta hingga menjadi kurang lebih sekitar 108 juta, ini mohon penjelasan dan klarifikasinya.

Saya rasa itu mungkin yang bisa kami sampaikan, memberikan kesempatan kepada Kawan-kawan yang lain.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Oke, selanjutnya Ibu Situ Mufattahah, siap-siap Ibu Nihayatul.

F-PD (SITI MUFATTAHAH, Psi) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IX DPR RI, Anggota Komisi IX DPR RI, Rekan-rekan semua serta mitra kerja kami BNP2TKI beserta jajarannya.

Sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya memberikan apresiasi kepada Pak Kepala BNP2TKI karena saya itu kagum sebenarnya kepada Pak Kepala BNP2TKI ini dalam hal penyampaian, luar biasa semangatnya dan itu membuat kita semua juga bersemangat Pak Nusron terima kasih penyampaiannya cukup bagus dan sangat luar biasa menurut saya.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak Kepala, yang kaitannya dengan asuransi Pak Kepala, saya lihat disini juga sudah bagus Pak Kepala juga memiliki pemikiran yang sama dengan saya terutama karena kaitannya dengan asuransi ini selama ini dilakukan atau ditangani oleh konsorsium asuransi tetapi karena ini jamannya, eranya BPJS kami setuju kalau BNP2TKI juga memiliki pemikiran bahwa asuransi ini ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, saya pikir itu berkaitan dengan asuransi baik itu asuransi kesehatan dan lain sebagainya itu BPJS saja, kami berharap Teman-teman juga mendorong agar asuransi TKI ini ditangani satu pintu yaitu BPJS Ketenagakerjaan yang in shaa Allah dalam, sudah dimulai sebenarnya tetapi nanti di Tahun 2016 optimalisasi semua kepesertaannya akan lebih optimal. Itu yang pertama.

Kemudian, yang kedua, berkaitan dengan masih masalah TKI, berkaitan perlindungan TKI yang khususnya di Arab Saudi karena sampai saat ini masih banyak masalah-masalah yang terjadi di Arab Saudi baik itu mungkin diketahui oleh BNP2TKI atau Kemenakertrans atau yang tidak diketahui juga begitu, selama ini juga banyak sekali TKI yang berangkat ke

Arab Saudi baik legal maupun ilegal itu juga harus menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, MoU yang sudah dilakukan, pernah terjadi moratorium pada Tahun 2011 kemudian diberikan kesepakatan kembali MoU pada 19 Februari 2014 bahwa MoU itu akan dilakukan seperti apa MoU yang secara detail, itu mohon diberikan informasi kepada kami dan bagaimana kelanjutan dari pelaksanaan penerapan dari MoU itu yang khusus dengan Arab Saudi karena mohon maaf ini juga saya punya pekerja kenapa tidak dirumah, dia anaknya TKI yang bekerja di Arab Saudi, dia pernah komunikasi dengan ibunya yang sedang berada di Arab Saudi, selama ini dia bekerja di sebuah rumah tangga dan per seminggu yang lalu kurang lebih majikannya kabur kemudian saat ini TKI tersebut berada di rumah kakeknya, ini kasus Pak Kepala ya, dia kabur, yang majikan si ibunya ini kabur, kemudian dia sekarang berada di rumah kakeknya yang majikan itu kemudian sampai saat ini belum dibayar dan sakit begitu, nah ini dia tidak berani melaporkan ini, dia hanya bercerita kepada anaknya, nah kasus-kasus yang seperti ini saya yakin sangat-sangat banyak sekali dan itu tidak bisa di deteksi atau belum dideteksi oleh BNP2TKI maupun Kemenakertrans.

Nah, oleh karena itu bagaimana ini, kan ini ada krisis center BNP2TKI, nah bagaimana optimalisasi penggunaan krisis center atau pun apakah kebijakan seperti apakah yang akan dikeluarkan oleh BNP2TKI bekerja sama dengan Kemenakertrans dalam menangani kasus-kasus yang seperti ini yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui, bagaimana mendata semuanya?

.....(rekaman terputus).....

Bapak Kepala, saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih sekali bahwa Bapak Kepala menyampaikan bahwa di Dapil saya Garut sudah diadakan, sudah atau belum ini Bapak Kepala, mohon maaf konfirmasi.

KEPALA BNP2TKI :

Di Garut itu 2 kali, yang sekali sudah, yang satunya hari Kamis nanti.

F-PD (SITI MUFATTAHAH, Psi) :

Nah, ini luar biasa Pak Kepala, terima kasih.

Tetapi saya sangat menyayangkan bahwa saya yang Dapilnya dari sana belum tahu sama sekali, nah ini kerjasamanya bagaimana, gimana saya mau memantau kalau setiap program yang digelontorkan ke Dapil kami, kami tidak bisa, tidak diberikan informasi, saya sudah beberapa kali kita mengadakan rapat dan kami berharap kerja sama yang baik di antara kami karena saya harus pastikan bahwa uang atau pun anggaran yang dikirimkan dari BNP2TKI bisa dilaksanakan secara baik. Pak Kepala mohon saya minta kontak personnya yang bisa komunikasi dengan kami, saya yakin Anggota Komisi IX DPR RI itu cuman 50 orang bahkan kalau hanya sekedar memberitahu dan kemudian apalagi kalau mempersiapkan bersama-sama subhanallah ini malah bagus, karena kami juga akan mengerahkan semaksimal mungkin, karena saya pernah juga komunikasi dengan BP3TKI yang berada di provinsi dan di daerah itu yang ditugaskan saya lihat banyak janji-janji dari BNP2TKI yang belum terealisasi, kena juga konsituen saya dan saya ditagih terus, ini di daerah garis selatan pernah

dikumpulkan KTP sampai 200 KTP, sampai sekarang *Ibu, ini saya dikejar-kejar katanya mau dikasih modal*, ini siapa orang yang ini, inilah maknanya Bapak tolong kordinasi dengan kami sehingga kami bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat, jangan sampai(*tidak jelas*)...ada seperti ini. Mungkin itu ya Pimpinan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan BNP2TKI ke depannya lebih maju lagi, lebih bekerja lebih baik lagi dan masyarakat lebih tertangani dengan baik.

Terima kasih atas perhatiannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Jangan lupa itu Pak Kepala pesan yang disampaikan tadi. Mungkin yang lain mau diundang juga itu Pak.

Selanjutnya Ibu Nihayatul, siap-siap Ibu Irma.

F-PKB (Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang menjelang sore.

Pimpinan Komisi IX DPR RI dan Rekan-rekan Komisi IX DPR RI dan juga Kepala BNP2TKI beserta jajarannya.

Terima kasih Bapak telah menyampaikan beberapa hal yang menarik yang bisa menjadi catatan dan langkah awal kita untuk bekerja lebih baik. Saya ingin melaporkan pertama adalah beberapa waktu yang lalu Pak Nusron, saya mendapat sms mungkin lebih jelasnya saya bacakan sebentar, nama saya Sunaryo Andiprayogo, alamat saya di Papua Jayapura dan saya mengikuti pelatihan Bahasa Korea di Banyuwangi dan saya mengikuti pendaftaran ujian EPS topik namun pada waktu saya memverifikasi data harus ke Makassar, sedangkan keberadaan saya sekarang di Banyuwangi dan misal harus ambil nomer ke Makassar juga harus berapa kali bolak balik ke Makassar.

Bapak Nusron yang saya hormati,

Ketika itu saya mencoba berhubungan dengan Kawan-kawan dari BNP2TKI dan katanya sudah ada peraturan baru kalau dari daerah lain bisa mengambil nomer di wilayah tempat dia ujian, saat itu saya mencoba menelpon di BP3TKI di Surabaya, mereka bilang bahwasannya ada nomer yang harus dimasukkan Bu dan itu tidak bisa dibuka kalau tidak dari KTP nya dari daerah tersebut, contoh kalau dari Papua berarti di Makassar Bu, nah itu menjadi kesulitan-kesulitan tersendiri Pak Nusron walaupun sebenarnya akhirnya hari ini baru saya dapat sms kalau sudah di verifikasi itu pun setelah saya menghubungi langsung ke Surabaya bagaimana itu bisa diverifikasi, yang ingin saya sampaikan Pak Nusron mungkin sebenarnya BNP2TKI sudah melakukan semacam baru untuk pendaftaran-pendaftaran peserta ini cuman mungkin belum terealisasi dengan baik di daerah sehingga Kawan-kawan yang di daerah seperti di Surabaya itu tidak tahu bahwa itu ternyata boleh dan bisa dibuka pendaftaran dengan

KTP lain, nah itu mungkin menjadi PR (Pekerjaan Rumah) dari BNP2TKI untuk bagaimana sosialisasi ke bawah dan sampai ini terjadi lagi.

Yang kedua, tadi saya sangat mengapresiasi bagaimana kita bisa cek informasi *by name, by address*, beberapa waktu yang lalu ketika saya turun ke Dapil ketika saya tanya di daerah apakah saya bisa mendapatkan data *by name, by address* untuk TKI, TKW yang dari Banyuwangi, mereka bilang kami tidak punya Bu kalau *by name, by address* di tempat penempatannya, contoh ke Taiwan mereka tidak bisa, mereka tidak memiliki ijin, nah kalau Bapak Nusron menyampaikan itu bisa mungkin itu lagi-lagi kurang sosialisasi ke bawah Pak karena yang saya tanya mereka menjawabnya *tidak punya Bu, kami by name by address disana, kami hanya punya alamatnya yang di Indonesia*, tetapi ketika alamat itu kerja di Taiwan apakah disana, siapa ininya, bisa atau tidak itu mereka tidak bisa menjawab dan saya punya *recordnya* itu Pak.

Yang ketiga, soal purna TKI.

KEPALA BNP2TKI :

Sebentar, itu yang dimaksud alamat di luar negeri ya?

F-PKB (Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA) :

Ya alamat di luar negeri, bukan hanya alamat di Indonesia tetapi alamat di luar negeri, karena kasusnya begini Pak Nusron beberapa waktu lalu ada seseorang dari Dapil saya yang bilang dia sudah 3 bulan tidak digaji kerjanya di Yordania atau dimana 3 bulan tidak digaji, mau pulang tidak punya uang lalu kemudian setelah saya *cross check* waktu itu di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mereka bilang ini ada laporan masuk tetapi namanya berbeda, alamatnya sama, yang laporan masuk di saya itu namanya Khadijah tetapi yang masuk ke daerah itu namanya Maulida tetapi alamatnya sama, nah itu antara nama dan ininya beda.

Soal Purna TKI Pak Ketua, saya setiap kali turun ke Dapil saya selalu berusaha untuk ketemu dengan Kawan-kawan purna TKI di beberapa wilayah kantong-kantong pengirim Tenaga Kerja Indonesia yang di Dapil saya, lalu mereka biasanya saya *support* untuk membuat semacam group-group di daerah masing-masing, lalu mereka mencoba mengidentifikasi kegiatan apa yang bisa dilakukan bersama yang bisa meningkatkan *income* mereka sehingga mereka tidak balik lagi. Nah, mungkin itu juga yang bisa dilakukan di Daerah-daerah, mungkin kelompok-kelompok purna TKI yang nantinya bisa disinergikan dengan program Pak Nusron tadi.

Yang terakhir, sama dengan Ibu Siti Mufattahah tadi beberapa waktu lalu saya mendengar kabar kalau Bapak ke Banyuwangi ke Dapil saya dan saya tidak tahu program yang sedang didiskusikan disana, masa ke tempat saya hanya untuk kampanye saja Pak Nusron. Mungkin itu yang sama dengan Ibu Siti Mufattahah, mohon kita kerja sama kira-kira apa yang bisa kita lakukan di Dapil karena nantinya ketika kita di Dapil yang bertanggung jawab toh masyarakat yang ditanya langsung termasuk kita, jadi sebagai mitra kita mesti bekerja sama Pak Nusron.

Terima kasih, itu saja dari saya.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT :

Oke sudah 2 orang yang complain Pak.
Berarti benar ya?

KEPALA BNP2TKI :

Belum datang ke Banyuwangi Pak.

KETUA RAPAT :

Selanjutnya Ibu Irma silakan, siap-siap Pak Ali Maher.

F-NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO, SE) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Terima kasih Ketua.

**Kawan-kawan yang saya cintai dan banggakan.
Kepala BNP2TKI dan seluruh jajarannya.**

Yang pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi juga kepada Kepala BNP2TKI yang tadi memberikan paparan sangat bagus, namun saya kira paparan itu juga harus mendukung dengan regulasi yang menjadi dasar hukum kebijakan kerja BNP2TKI, jadi Undang-Undang No.39 Tahun 2004 itu juga harus direvisi Pak Nusron dan Kawan-kawan karena kalau itu tidak dilakukan revisi maka kinerja dan kerja dari BNP2TKI tidak akan maksimal, itu yang pertama.

Kemudian, yang kedua, saya ingin sekali lagi menyampaikan kepada BNP2TKI bahwa kondisi tenaga kerja pelaut kita sangat-sangat mengkhawatirkan, sangat-sangat terdiskriminasi, dieksploitasi kemudian nasibnya tidak ketahuan juntrungannya, kenapa? Karena buku pelaut yang mereka miliki lebih dari 50% buku pelaut yang mereka miliki itu palsu Pak Nusron dan saya punya buktinya karena kemarin mereka audiensi ke saya, ke Fraksi Partai Nasdem untuk menyampaikan bahwa *ini loh Bu contoh buku pelaut palsu*, nah lebih dari 50% ternyata buku pelaut itu palsu Pak Nusron, ini mengkhawatirkan kita, kenapa? Karena ketika hanya memegang buku dokumen palsu, ketika terjadi masalah di luar negeri, di kapal-kapal asing tempat mereka bekerja mereka tidak bisa menuntut apa pun dari situ, karena satu, buku pelaut mereka palsu dan yang kedua, PJTKI yang mengirim mereka ke luar negeri ke kapal-kapal asing itu ternyata banyak yang fiktif dan tidak bertanggung jawab, kemarin ketika Raker dengan Pak Menteri Pak Hanif sudah saya sampaikan mohon untuk ke depan untuk PJTKI yang khusus menangani masalah pelaut itu ijin untuk operasionalnya itu harus juga dikoordinasikan dengan Menteri Perhubungan, karena keagenan ada di Menteri Perhubungan maka ketika keagenannya sudah beres baru boleh dikeluarkan ijin untuk perusahaan tersebut mengirim TKI ke luar negeri, itu penting. Kalau itu tidak dilakukan koordinasi seperti itu maka nanti ketika terjadi masalah saling lempar tanggung jawab, mereka mau ke Menhub, Menhub bilang itu persoalannya ada di Menaker, ketika ke Menaker mereka dikatakan bahwa itu persoalan dari persoalan Menhub, ini yang mungkin harus ditindaklanjuti segera.

Kemudian, yang terakhir, ini kan ada pemulangan-pemulangan tenaga kerja kita dari Yaman, kondisi politik Yaman yang hari ini sangat bergejolak nah kita kan punya kurang lebih 4000 orang Indonesia di Yaman, nah 2500 lebih itu mahasiswa dan santri, selebihnya adalah tenaga kerja kita, nah tenaga kerja kita yang sampai hari ini sudah sekitar hampir 1000 yang sudah dipulangkan tentu ini juga akan membawa masalah baru ketika Pemerintah Yaman kondisi konfliknya tidak segera pulih, nah bagaimana kita bisa menanggulangi kondisi sosial ekonomi kawan-kawan yang dipulangkan ini, walaupun mereka pulang secara sukarela, tentunya biaya hidup mereka kalau lebih dari 3 bulan nanti mereka di Indonesia pulang kemudian tidak ada pekerjaan, ini akan menjadi persoalan baru lagi. Nah, juga harus dipikirkan bagaimana solusinya. Saya kira itu saja Pak Kepala BNP2TKI mohon agar dapat diberikan solusinya agar kami Komisi IX DPR RI ketika diberikan masalah-masalah seperti ini kami juga bisa memberikan jawaban yang betul, karena Pemerintah dan Parlemen itu harus saling berkoordinasi, saya kira itu saja.

Terima kasih.

Wabilahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam.

Pak Ali Mahir silakan, siap-siap Pak Ali Taher.

F-NASDEM (ALI MAHIR) :

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Bapak Ketua dan Kawan-kawan Komisi IX DPR RI,
Bapak Kepala BNP2TKI Nusron Wahid.**

Tadi sedikit menyoroti penguatan mediasi dan advokasi kasus TKI, disitu kan ada krisis center juga ya, saya ingin tahulah paling tidak laporan-laporan apa yang selama ini banyak diterima di krisis center BNP2TKI sendiri karena masalah-masalah itu dan jenis-jenis kasus itu perlu kita ketahui bersama bisa menjadi bahan evaluasi mungkin, kemudian kalau kita Pemerintah dan DPR RI terkait akan kinerja itu sendiri kalau kasus-kasus itu akan memperkecil paling tidak, juga perlu mempertanyakan yang paling banyak Negara-negara mana misalnya tadi Ibu Siti sudah mengatakan Arab Saudi, ada juga beberapa di Malaysia ya, sehingga TKI-TKI kita yang saat ini ada disana ataupun yang akan kesana setidaknya-tidaknya tahu bahwa prioritas-prioritas itu akan terjadi kasus semacam itu dapat kita minimalisirlah setidaknya itu dulu dan tentu kita tahu bahwa untuk lapangan kerja di dalam negeri masih kurang ya sehingga demikian inilah untuk memberikan semangat sendiri bagi keluarga dan calon TKI itu sendiri untuk perlindungan-perlindungan kita di wilayah-wilayah yang sekiranya kita lihat dari krisis center tahu kasus-kasus akan terjadi.

Saya pikir itu dulu Pak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Dokter Ali Taher.

F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH.,M.Hum) :

*Bissmillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Saudara Pimpinan dan Ustad Nusron Wahid,

Saya kira ada tiga hal yang ingin saya sampaikan, terima kasih ada *time line* Tahun 2017 itu kita zero tenaga kerja informal kita mengapresiasi itu. Pertanyaan langkah apa yang sudah dan sedang dilakukan? Karena ini penting, saya khawatir kalau semangat dari BNP2TKI ini sudah berjalan bagus kemudian di lapangan tidak diresponi dengan baik oleh pengerah tenaga kerja.

Yang kedua, usul penempatan tenaga kerja itu terlebih dahulu dilakukan identifikasi jenis-jenis pekerjaan yang diluar negeri itu seperti apa, karena selama ini kan kita tahu orang dari kampung langsung kesana, bahasanya pun tadi Bahasa sunda atau Bahasa jawa hampir-hampir Bahasa Indonesia tidak paham juga, nah oleh karena itu menurut hemat saya perlu ada identifikasi betul-betul dilakukan oleh pemerintah baik itu oleh BNP2TKI, Menaker maupun Pemerintah Daerah supaya bisa menjamin perlindungan bagi Warga Negara kita yang mencari pekerjaan, mencoba nasib diluar negeri. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya sejak dari awal pelatihan-pelatihan yang diarahkan kepada tenaga kerja dalam rangka pertama, pengembangan sikap budayanya, budaya kita dengan budaya mereka kan barangkali ada kesamaan tetapi mungkin ada perbedaan diantara kedua budaya itu, kita tahu bahwa orang Arab biasanya disana itu tahunya Islam, kita menganggap bahwa orang disana baik semua padahal pelaksanaannya tidak seperti itu apalagi alirannya ISIS sama *ahli jamaah* itu berbeda, kemudian yang kedua itu ada *knowledge* nya, pengetahuannya, pengetahuan tentang jenis pekerjaan yang dilakukan itu betul-betul harus dikuasai pengetahuannya, minimal *basic knowledge*nya.

Yang ketiga, *skill*nya, keterampilannya. Nah, oleh karena itu ketiga-tiganya ini menjadi fokus dan harus diformulasikan dalam kurikulum sehingga Tenaga Kerja diluar negeri itu betul-betul terlatih dan melahirkan kompetensi. Yang ketiga, adalah konsistensi dari pejabat Negara kita termasuk BNP2TKI untuk mengawal itu, supaya tenaga kerja ke luar negeri itu betul-betul punya nilai, punya harga dan lain-lain sebagainya termasuk misalnya upaya yang dilakukan tadi luar biasa saya terharu sekali adanya misalnya menyangkut kesehatan mereka dijamin BPJS misalnya, itu juga satu hal yang terobosan baru saya kira, kemudian juga misalnya ada dengan sistem informasi mereka punya HP kemudian kita bisa memiliki akses untuk mendapatkan dimana mereka posisinya itu saya kira juga satu hal yang baik.

Yang terakhir, adalah mediasi dan advokasi. Mediasi dan advokasi ini dilakukan jangan ketika ada masalah baru kita lakukan mediasi dan advokasi tetapi pada saat mereka dari rumah sambil menuju ke Bandara sampai ke tempat yang bersangkutan, Negara tujuan sampai kepada mereka bekerja itu dilakukan apa namanya diikuti perkembangan-perkembangan perjalanan mereka sehingga ketika terjadi sesuatu mereka sudah bisa lebih awal kita mengetahui problem yang dihadapi, saya kira ini saja dari Fraksi PAN mendukung sepenuhnya perjuangan yang dilakukan oleh BNP2TKI meskipun pilihan KIH dan KMP berbeda tetapi sekarang ini kita seperti sandal jepit, kata Hasyim Mujadi NU dan Muhammadiyah itu seperti sandal jepit, dia tidak bertemu lagi berjalan tetapi susah dipisahkan, nah kira-kira begitu, KIH dan KMP kira-kira begitu, ini nasehat saya untuk Mas Nusron Wahid, sahabat saya, adinda saya yang luar biasa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Nanti saja ditanggapi Pak Kepala.

Biasanya ada berbalas pantun kan, selanjutnya Pak Djoni silakan siap-siap Ibu Amelia.

F-HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE.,M.MAR,MBA) :

**Rekan-rekan Anggota Komisi IX DPR RI,
Kepala BNP2TKI dan jajarannya.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saya Djoni Rolindrawan Fraksi Hanura dari Dapil Jabar III meliputi kota Bogor kabupaten Cianjur.

Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Kepala BNP2TKI yang telah memaparkan rencana-rencananya saya kira bagus sekali, hanya nanti mungkin pelaksanaannya juga tidak mudah tetapi bukan mustahil saya kira dengan kerja keras, fokus saya kira bisa tercapai. Tetapi disebutkan bahwa sebaiknya ada direncanakan bahwa TKI kita itu menjadi peserta BPJS, saya kira saya berpendapat lain begitu karena BPJS itu mengacunya ke penduduk begitu jadi bukan ke warga Negara, jadi disebutkan di ketentuan umum Bab I mengenai ketentuan umum ya Pasal 1 *peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.* Jadi, saya kira itu dikeluarkan begitu kalau yang misalnya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, kemudian definisi iuran pun sejumlah iuran secara teratur dibayar oleh peserta pemberi kerja dan atau pemerintah begitu, jadi yang saya usulkan itu tenaga kerja kita itu di dalam kontrak dilindungi haknya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan jaminan kematian dan juga kecelakaan kerja seperti itu, jadi di dalam kontrak dimana mereka itu ditempatkan seperti itu, jadi tidak dicover oleh BPJS saya kira seperti itu ya, itu yang saya lihat. Jadi dimasukkan di dalam kontrak.

Yang kedua, tadi disebutkan bahwa sudah ada BUMN yang program KUR (Kredit Usaha Rakyat) ya Pak Nusron, itu kena berapa persen? Karena flat 30-33% itu saya kira juga lumayan berat buat calon TKI

sementara kalau misalnya kita menempatkan dana pun sekarang kisarannya dibawah 10% misalnya sebagai deposit seperti itu, jadi mungkin marginnya itu terlalu besar walaupun diketahui memang tanpa jaminan kemudian ada juga masalah di *collection*nya seperti itu, saya kira mudah-mudahan dengan ada kesediaan dari Bank BUMN yang memberikan kredit usaha ini akan meringankan para calon TKI kita.

Demikian dari saya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Silakan Ibu Amelia.

Siap-siap Ibu Okky.

F-NASDEM (AMELIA ANGGRAINI) :

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati dan Rekan-rekan Komisi IX DPR RI yang saya banggakan.

Bapak Kepala BNP2TKI dan jajarannya yang saya hormati.

Terima kasih atas paparannya.

Saya ingin menanyakan satu, terkait dengan remitansi, bagaimana progress kesiapan Bank umum untuk memiliki Bank koresponden di Negara penempatan sehingga remitansi menggunakan jasa resi dengan *rate* murah dan aman dan bisa dinikmati oleh para TKI, nah apakah sudah ada kebijakan dari Bank Indonesia untuk meminta otoritas Bank Central Negara penempatan yang dapat diimplimentasikan transaksi non tunai. Kemudian, yang kedua adalah saya ingin menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Rekan Nini tadi terkait dengan pembinaan TKI purna. Bapak Kepala BNP2TKI beberapa waktu yang lalu pada saat RDP yang lalu telah menjelaskan terkait dengan *pilot project* kampung TKI yang akan dilaksanakan di beberapa desa untuk pembinaan purna TKI serta rekomendasi agar BLK segera diperkuat untuk menampung dan memperdayakan TKI illegal, yang mana ini bekerja sama dengan BUMN dan NGO, sejalan dengan hal tersebut pada Rapat Kerja dengan Kemenaker kemarin salah satu kendala percepatan revitalisasi BLK adalah sebagian besar BLK tersebut masih dalam tanggung jawab pemerintah daerah sehingga Komisi IX DPR RI pada kesimpulan yang kemarin merekomendasikan Kemenaker untuk membuat *grand design* penarikan BLK ke pusat dan untuk proyeksi revitalisasi BLK sepertinya akan menunggu waktu karena menurut Pak Menteri Kemenaker dibutuhkan dana sekitar Rp.1 triliun untuk upaya percepatan revitalisasi tersebut, kondisi ini saya harapkan harus dipikirkan oleh BNP2TKI agar sistem pembinaan terhadap purna TKI tetap bisa berjalan, nah itu untuk menjadi catatan saja.

Kemudian, yang terakhir, sehubungan dengan kondisi BLK yang kurang maksimal performa kemudian juga ada juga kebijakan moratorium untuk tenaga kerja informal ke luar negeri ditambah lagi kondisi perekonomian kita sekarang kurang baik sehingga menjelang MEA

Desember mendatang akan segera kita hadapi, bursa tenaga kerja asing tentu saja mengancam kesempatan tenaga kerja lokal, nah saya khawatir sehubungan dengan fakta-fakta tersebut untuk target sasaran pembangunan nawacita dalam menciptakan kesempatan kerja tidak dapat terpenuhi, jadi mohon penjelasan Bapak Kepala BNP2TKI terkait evaluasi moratorium tersebut.

Nah, demikian yang saya sampaikan.
Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Oke, selanjutnya Ibu Okky silakan.

F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI,M.Si) :

Ya terima kasih.

Pimpinan dan Komisi IX DPR RI yang saya hormati dan saya banggakan.

Bapak Kepala BNP2TKI beserta jajarannya yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Nusron, terima kasih untuk paparannya, saya jadi ikut semangat untuk mengikuti apa yang Bapak paparkan begitu dan kali ini saya hendak menyoroti satu hal saja yang hendak saya kupas dalam dua aspek, pertama saya melihat di slide halaman 31 yang terakhir yaitu mengenai *road map* BNP2TKI wujudkan lima kondisi di Tahun 2019, *zero* TKI informal, pra keberangkatan rata-rata 1 bulan, dua bulan gaji biaya maksimal, TKI, remitansi TKI meningkat 3 kali lipat, perlindungan utuh di empat tahapan, TKI Purna jalani lima solusi mandiri.

Pak Kepala Badan, saya melihat *road map* ini seperti obat, obat bagi penyakit TBC, penyakit TBC bisa sembuh kalau memang obatnya dipergunakan dengan baik dan juga dengan pengawasan yang baik, tanpa pengawasan yang baik meskipun obatnya tokcer maka penyakit itu tidak bisa sembuh dan saya menganalogikan bahwa *road map* Bapak ini seperti obat penyakit TBC dan pengawasannya saya hendak mengaitkan Disnes Nomer 11 yaitu *employment services officer* disitu Bapak katakan bahwa yaitu staf lapangan yang berfungsi untuk mengawasi PPTKIS dan poin 2 dan 3, saya hendak mengaitkan dengan PP Nomer 4 Tahun 2015 dimana disitu dikatakan pelaksanaan pengawasan terhadap penempatan dan perlindungan TKI dimana hal itu dilakukan oleh bidang pengawasan ketenagakerjaan, nah pertanyaan saya bagaimana kemudian Peraturan Pemerintah Nomer 4 Tahun 2015 Bapak kaitkan dengan *employment services officer* dan Bapak kaitkan juga tadi dengan obat BNP2TKI tersebut, karena menurut hemat saya semua program itu bisa bagus ketika ada pengawasan yang komprehensif antara pra penempatan, penempatan maupun pasca penempatannya, saya minta bagaimana melakukan sinergi yang(*tidak jelas*)...dan masih dengan *road map* tadi tentu saya yakin dan Rekan-rekan juga kami disini di DPR RI khususnya Komisi IX DPR RI mendukung *zero* TKI informal tetapi Pimpinan pada kesempatan yang terhormat ini saya juga mengharapkan agar kita bisa mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang No.39 Tahun 2004, karena memang

berbicara mengenai penempatan dan perlindungan TKI informal itu semua berada di Undang-Undang No.39 Tahun 2004 karena sekali lagi kami mengharapkan kepada Pimpinan agar disegerakan percepatan bagi pembahasan bagi devisa undang-undang tersebut.

Itu saja, terima kasih.

Lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin.

Wabilahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya Ibu Andi Fauziah.

F-PG (Drg. Hj. ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA, SKG) :

Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI yang saya hormati.

Kepala BNP2TKI beserta jajarannya yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak Kepala BNP2TKI, yang pertama-tama hal yang sangat penting untuk kita camkan bersama bahwa dalam perkembangannya saat ini situasinya sudah menjurus pada *urgency* perubahan kebijakan dalam hal pengelolaan TKI, perdebatan soal TKI selama ini hanya berlangsung parsial dan kita selalu berebutan hilirnya seolah-olah bahwa tidak ada lagi persoalan di hulunya, banyak hal yang telah berubah misalnya penerangan sistem jaminan sosial nasional, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan maupun tuntutan publik atas perbaikan tata kelola TKI sudah sangat tinggi, dari situ kita melihat bahwa masalah-masalah TKI saat ini secara jelas menunjukkan bahwa aturan perundangan yang ada kurang memadai sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian kembali, sudah sangat mendesak untuk mengatasi masalah TKI secara utuh dan menyeluruh untuk menjawab tantangan yang ada. Oleh karena itu, melalui forum yang terhormat ini, melalui meja Pimpinan, saya mendesak agar revisi Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI agar prosesnya segera dilanjutkan sebagai kerangka untuk menyelesaikan masalah TKI secara komprehensif dan hal ini juga tadi sudah diungkapkan oleh Rekan Irma dan Rekan Okky, saya menganggap bahwa kebijakan Ad-hoc semacam moratorium seharusnya digunakan untuk merumuskan dan memformulasikan regulasi yang memadai sehingga perlindungan TKI dapat dijalankan lebih baik dari sebelumnya. Terkait dengan ini setahu saya pembahasan tingkat pertama sudah dilaksanakan, saya rasa sudah perlu untuk dilanjutkan pada pembahasan tingkat selanjutnya.

Yang kedua, Bapak Kepala BNP2TKI, soal kasus yang menimpa ADK kita, saya menganggap masalah ini sangat penting dan saya sedikit memberikan perhatian karena di daerah asal saya adalah daerah yang merupakan penyumbang ADK di Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar adanya 74 orang ADK kita yang diduga menjadi korban *trafficking* oleh kapal Taiwan berbendera Indonesia dan ditahan di Afrika Selatan, para ADK ini mengalami bukan hanya gaji yang

tidak dibayarkan, jam kerja yang berkepanjangan, pemenjaraan yang bukan kesalahan mereka, kekerasan fisik dan psikis hingga praktek illegal berupa perburuan hiu dan paus, kesimpulannya adalah bahwa para ADK ini kurang mendapat perlindungan padahal mereka sudah memiliki KTKLN yang notabene merupakan dokumen sistem perlindungan TKI. Menurut saya soal KTKLN ini sendiri sudah menuju kontroversi, kenapa? Karena bertabrakan dengan Undang-Undang Imigrasi dimana dokumen TKI itu cukup dengan paspor dan visa kerja. Untuk itu, saya merasa perlunya ada sinkronisasi aturan tetapi yang paling penting adalah bahwa perusahaan perekrut ABK ini sebaiknya memiliki dua ijin yaitu ijin PTKIS dan ijin rekrut ABK, hal ini tidak saja sifatnya khusus bagi tenaga kerja ABK tetapi dari kasus ini perusahaan perekrut ABK juga terlibat, berdasarkan data yang ada sampai Desember 2014 ada 277 ABK yang dipekerjakan perusahaan Taiwan yang dipulangkan tanpa mendapatkan hak gajinya, pada waktu yang bersamaan pula hanya ada dua perusahaan yang terdaftar dan memiliki surat ijin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal sehingga Perusahaan-perusahaan yang merekrut ABK tersebut tidak terdaftar memegang ijin, jadi punya dalih dan kemungkinan lepas dari tanggung jawab.

Yang terakhir, soal desentralisasi kewenangan dalam penanganan TKI, menurut saya masalah TKI ini adalah tanggung jawab seluruh pihak terkait, karena itu sangat urgent untuk melibatkan pemerintah daerah dalam hal ini, kita semua tahu bahwa proses perekrutan TKI ini bermula sejak dari satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa ataupun Kelurahan sehingga mungkin sudah perlu dirancang skim pelibatan pemerintahan desa untuk ikut mengatasi persoalan TKI dan imigrasi non prosedural intinya adalah mengakui peran pemerintah desa dalam sistem dan mekanisme perlindungan yang disusun pemerintah pusat atau nasional. Regulasi tentang perlindungan TKI bahkan perlu di dorong sampai tingkat desa mungkin melalui Perdes. Selain itu desa juga harus memiliki kemampuan untuk memberikan rekomendasi dan konsultasi kepada calon TKI tentang imigrasi yang aman.

Selanjutnya, dari sisi pelatihan, selama ini pendidikan dan pelatihan calon TKI sangat terfokus kepada aspek keterampilannya saja sehingga Pak Ketua ketika kadang-kadang hak TKI menghadapi masalah atau suatu krisis sehingga pelaksana pendidikan dan pelatihan calon TKI juga kurang terpantau, karena itu perlu peran pemerintah daerah untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan pra keberangkatan melalui pendidikan luar sekolah dan atau sekolah kejuruan yang juga menitikberatkan pada hak-hak TKI.

Demikian yang saya sampaikan kepada kesempatan ini.

Terima kasih.

Wabilahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam.

Masih ada yang mau tanya?

Kalau tidak ada saya pikir langsung Pak Kepala Badan menanggapi, waktu saya berikan seluas-luasnya kepada Pak Kepala Badan.

KEPALA BNP2TKI :

Baik Pak terima kasih atas perhatian dan atensinya.

Kami mohon maaf tidak mungkin bisa menjawab satu per satu tetapi kami sudah mencoba untuk mengklasifikasi pertanyaan secara umum. Yang pertama, lebih banyak menyoroti tentang penempatan, yang kedua, bicara masalah perlindungan mulai dari hukuman mati, asuransi dan sebagainya itu case perlindungan, kemudian yang ketiga adalah masalah konsepsi ke depan kayak apa yang hendak dibangun.

Pertama, kami ingin menyampaikan yang konsep si makro dulu ya karena tadi banyak yang menyinggung bagaimana kalau kita zero TKI informal bagaimana caranya dan sebagainya, saya ingin membaca dulu konsep ini dari makro ekonomi dulu.

Bapak, Ibu sekalian.

Total angkatan kerja kita yang jenjang pendidikannya lulusan SD dan SMP itu ada 62%, total angkatan kerja kita yang SD dan SMP, saya ngomong umum dulu ini yang makro ekonomi, total angkatan kerja kita yang setiap tahunnya 2,8 juta setiap tahun angkatan kerja baru.

Pertumbuhan ekonomi kita tahun ini berdasarkan asumsi APBN 5,7 dan menurut Bappenas kalau semua project-project nya Pak Jokowi ini lancar mencapai 8% kalau semua lancar, tidak ada gangguan. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap 250 tenaga kerja maksimum artinya kalau pertumbuhan ekonomi kita hanya 5,7 hanya mampu menyerap tenaga kerja 1,4 juta orang, yang 1,4 juta kemana lagi? Tadi Ibu Amelia Anggraini menyampaikan itu sama Ibu Irma Hutabarat, mohon maaf Ibu Irma Chaniago, jadi ingat penyiar Irma Hutabarat. Nah, kemana larinya? Pasti akan ada migrasi, migrasi pertama dari desa ke kota, dari Maumere, Ende, Nagakeo, Belu kemudian timur dan sebagainya lari ke kota, ke Surabaya, Jakarta dan sebagainya, kalau sudah tidak mampu menampung di Jakarta lari ke kantong-kantong kebun sawit, tambang dan sebagainya di Kalimantan, di Sumatera, kalau sudah tidak mampu menampung pasti akan keluar negeri, ada moratorium, ada tidak ada moratorium pasti ini terjadi tinggal bagaimana pemerintah mengatur, ini kenyataan yang ada, kecuali kalau pertumbuhan kita mencapai 10-12% semua terserap, rasa-rasanya ya moga-moga kita bisa 10-12% tetapi saya yakin Pak Asman Abnur mengatakan sepakat dengan saya belum mungkin, kalau sampai Tahun 2019 kita sampai 10-12%, bisa 7%, 8% sudah sebuah prestasi luar biasa untuk sampai kesana, dengan demikian pertanyaan saya adalah kita mau apakan modal atau bahan baku angkatan kerja Indonesia yang hanya 26% tadi lulusan SD, SMP mau kita apakan dalam kondisi seperti itu, nah mau tidak mau satu-satunya jalan yang kita lakukan adalah melakukan *upgrade and up skill*, bagaimana caranya? Transformasi *upgrade and up skill*, kami sudah mengkaji di Direktorat Harmonisasi, kurikulum SMK kelas 1 sampai kelas 3 yang diajarkan tidak tahu, itu kalau kita lihat 55% itu materi pokok, Islam, PPKN dan sebagainya, yang materi inti tentang SMK hanya 55%, 3 tahun itu kalau di *trust* hanya sekitar 800 jam bisa diberikan dalam waktu 6 bulan sampai 8

bulan dengan asumsi 1 hari 8 jam sampai 10 jam, hanya materi pokok. Bagaimana solusi pertama untuk itu? Yang pertama, adalah ada *upgrade, up skill*, Teman-teman yang lulusan SD, SMP dengan kurikulum SMK plus tadi kita menyebutnya SMK mini dan Pemda Jawa Timur Pakde Karwo sudah melakukan *pilot project* untuk ini, tinggal ini *copy*, diperdayakan kemana-mana, ditambahi tadi yaitu dengan Bahasa dan budaya yang semua dia menjadi PLRT ditarik menjadi *hospitality*, Pakde Karwo sudah melakukan itu hanya cukup 8 bulan sampai 10 bulan mengganti kurikulum SMK dan yang 3 tahun itu.

Kemudian, yang kedua, model penempatan, kalau saat ini model penempatannya itu adalah kontrak individu jelas pemerintah mana pun kalau model kontrak individu, Menteri siapa pun, Kepala BNP2TKI nya siapa pun, Menlunya siapa pun saya jamin tidak akan bisa mengendalikan masalah kalau masih kontrak individu, tidak mungkin Atase Ketenagakerjaan hanya 1 orang dengan staf 4 orang, konseler itu 4-5 orang berhubungan dengan 200 ribu pengguna Kepala Rumah Tangga yang sifatnya *privet* semua tertutup. Caranya bagaimana? Diubah menjadi kontrak terhadap *company* kepada perusahaan sebagai TKI Formal tetapi dia ditetapkan, boleh dia ditetapkan dalam publik, juga boleh ditetapkan dalam domestik, kayak perawat, perawat ada yang ditempatkan di rumah sakit, ada yang ditempatkan menjadi perawat pribadi. Ini statusnya bukan PRT tetapi *hospitality* ada ditempatkan di publik yaitu di restoran dan sebagainya atau di hotel, ada juga yang ditempatkan di rumah-rumah tetapi gajinya, standarnya, *skill*nya adalah *skill hospitality, impactnya* standar gaji tinggi, proteksi dan perlindungan kuat dan bermartabat. Ini solusi kalau kami ditanya tentang zero PLRT bagaimana caranya, karena apa? Bahan baku kita 62% SD dan SMP bahan bakunya yang ada.

Kemudian yang kedua, pertanyaan Pak Ali Taher ini sangat filosofi, yaitu tentang konsepsi dan bangunan revitalisasi BLK, jadi ini Pak jawaban tadi tentang MoU ke depan kayak apa gini caranya, bagaimana dengan BLK? Pak, Bu, saya ingin menyampaikan masalah apakah BLK itu dimiliki oleh Pemda Daerah atau pusat itu menurut kami tidak isu, sekolah-sekolah di daerah juga dimiliki oleh Pemda tetap bisa mengajar, ini yang paling penting adalah sinkronisasi dan koordinasi soal kurikulum, ini persoalannya adalah belum ada kurikulum baku, belum ada standarisasi instruktur yang baku dan belum ada asesor yang baku di dalam dunia lokasi ini, mohon mas kami ingin contoh perbandingan Filipina, di Filipina ada satu lembaga namanya TESDA (Technological Skill and Development Authority) yang khusus melatih itu semua, di kita ada Bina Lattas, ada Direktur kursus di Kemdikbud, ada 2 lembaga, di Filipina hanya 1. Di Bina Lattas, disini hanya meluluskan 80.000 orang 1 tahun, di Lembaga Kursus yang dibantu hanya memberikan bantuan 400.000 orang peserta lembaga kursus di Kemdikbud. Di Filipina TESDA itu 1 tahun meluluskan 1,8 juta dan 1,4 nya mempunyai internasional sertifikat, karena terpadu. Saya malah mengusulkan kalau kita ingin serius menangani ini Bina Lattas, mohon maaf ini *out of contact* dari jabatan saya tetapi kalau kita ingin membenahi ini semua Bina Lattas sama Direktorat Kursus di Kemdikbud itu dijadikan satu kemudian dikonsolidasi membuat kurikulum yang sama standarisasi instruktur dan standarisasi kurikulum dan standarisasi asesor yang ada, hari ini kita tidak ada.

Contoh, mohon maaf *off the record* ini, mohon maaf untuk wartawan jangan dikutip, contoh sederhana Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Permenaker No.1 Tahun 2015 tentang 7 level job dimana PLLRT itu harus kalau *caregiver* ya nyuci, nyuci saja, nyapu ya nyapu saja, masak ya masak saja, 7 jabatan begitu kan? Abis itu kita *follow up* rapat internal kami, kami undang BNSP, kami undang dari Bina Lattas, dicalon BNSP, pertama saya ingin tanya ketika ada Kemenaker ini bisa jalan apa tidak? Apakah kurikulumnya sudah dibuat belum? *Belum*, kurikulum Tahun 2013 langsung diberlakukan, kisruh diprotes dimana-mana sehingga ditarik lagi, ini membuat satu kebijakan belum ada kurikulumnya di lapangan, kemudian yang kedua, instrukturnya sudah di Bimtek belum? Disesuaikan dengan adanya perubahan ini? *Belum*, yang terakhir di BNSP, asesornya sudah dipersiapkan belum untuk ini? *Belum*, yang ke empat, maketnya ada tidak yang minta seperti itu? *Belum jelas*. Nah, kalau demikian, kita harus belajar bahwa kita membuat kebijakan resetnya harus jelas dulu bukan atas dasar keinginan tetapi reset kebutuhan, kami sampai hari ini takut jujur saja, suatu hari kami bisa jadi temuan BPK, kenapa? Karena kolega-kolega kami masih melayani jenis pekerjaan job order yang tidak sesuai dengan Permenaker No.1 Tahun 2015 tetapi ini sudah ada DOnya atau JO dari luar negeri, kalau tidak kami layani ya kisruh, sistemik ini, dianggap kita memboikot pelayanan publik tidak proper, tetapi kalau kami layani dengan adanya ini suatu hari ada audit investigasi atau audit kinerja dari BPK, *kenapa anda melayani tidak sesuai dengan kebijakan Permenaker No.1?* sudah jadi masalah.

Bapak, Ibu sekalian, hari ini posisi kita dilematis. Justru kami sudah kirim surat kepada Kementerian untuk direspon tetapi hari ini belum ada tanggapan, jujur saja hari ini kami ketakutan ini, ketakutan kalau ini ada audit kinerja dari BPK karena tidak sesuai di lapangan, kami sampaikan juga ke Ibu Menteri Luar Negeri, *Bu, Teman-teman di KBRI ikut menjadi temuan BPK kalau tidak menyuarkan masalah ini*, karena mengeluarkan surat tidak sesuai dengan kebijakan yang diambil Menteri, tetapi kalau tidak kita layani sistemik di lapangan pada satu sisi, ini butuh sesuatu yang konkrit kebijakannya, nah ini kira-kira kami kalau diminta bagaimana secara formalisasi dan informal dan revitalisasi birokrasi, karena itu menurut hemat saya revitalisasi BLK ini tidak terkait dengan Pemerintah Daerah, dia dikuasai oleh Pemerintah Daerah tidak masalah, sekolah juga dikuasai oleh Pemda bahkan yayasan juga bisa jalan, tinggal regulasi yang mengatur dan standarisasi yang ada.

Nah, Bapak, Ibu sekalian, yang kedua, ini masalah konsep. Yang kedua, kembali ke *cost structure*, yang dari PKS? Dari Sragen, Wonogiri ini masuk peta 55 kabupaten ini. Nah, betul sekali Mas *cost structure* tadi itu, yang sebelumnya tadi yang formal, ini Mas yang saya sampaikan tadi memang betul ini yang ingin kami ubah untuk berangkat kesana, untuk potongan kerja disana selama 3 tahun bukan 2 tahun, itu kena 120 juta dengan asumsi gaji hanya sekitar 8 juta, jadi kalau kami identifikasi ini biaya ini semua termasuk *fee agency* dan macam-macam ini yang menurut saya *impossible* dan tidak manusiawi, betul Pak. Nah, kami sudah mempropose kalau bisa ada pergeseran sehingga turun 76 juta itu sudah mati-matian, sampai hari ini kami sudah kirimkan nota supaya dibuatkan forum JWD, karena penentuan masalah ini tidak bisa sepihak, harus dua

belah pihak antara kita dan negara setempat, sampai hari ini belum direspon tetapi hanya direspon 1 kenaikan gaji untuk sektor informal per 1 Juli Tahun 2015 ini dari 580 MT atau sekitar 6,9 juta menjadi 17.500 MT atau sekitar 8,5 juta. Dia tidak mau mengurangi biayanya tetapi hanya mau menaikkan gaji Taiwan, ya ini berjuang kenyataan yang ada, isunya kalau kita stop dia langsung menaikkan, karena itu mohon Bapak dan Ibu sekalian ini mohon maaf bagi wartawan kalau kita bicara tentang moratorium dan sebagainya itu kadang-kadang di sisi kita dalam rangka menaikkan gaji juga, bukan dalam rangka serius-serius juga kadang-kadang, mohon maaf ini jangan dikutip, nanti kalau dikutip juga bocor teka tekinya, gertak-gertak juga supaya naik gaji supaya perlindungan lebih baik.

Nah, kemudian masalah revisi undang-undang, saya setuju memang *benchmark*, memang kita harus membuat *benchmark*, Bapak, Ibu sekalian saya kembali ke filosofi, kita ini sebagai sebuah negara, negara banci, mohon maaf ini, ini pandangan saya, Filipina jelas karena Filipina mempunyai pendekatan label ekspor, jelas, berani karena label ekspor dia mempunyai sistem apa ditata kemudian semua ditata dengan baik, migrasi itu memang ekspor karena dia sadar kontribusi TKI besar, dia pendekatan label ekspor, di Indonesia tidak berani ngomong label ekspor, malu, di Indonesia migrasi itu pilihan, karena pilihan maka konsekuensi kita dalam Pasal 27 Undang-Undang Tahun 1945 adalah Negara wajib memberikan pekerjaan dan pendapatan yang layak kepada Warga Negaranya, karena itu *heavynya* adalah perlindungan, di dalam nawacita Pak Jokowi poin 2 menyatakan *Negara wajib melindungi Warga Negaranya di luar negeri terutama pekerja migran*, tidak mempromosikan, tidak mencarikan, tidak mempersiapkan, melindungi artinya pilihan, karena pilihan kita tidak pernah mempunyai artinya ada devisa atau tidak ada devisa itu tidak penting, karena kita masih banci tetapi kebetulan karena yang melakukan memilih, pilihan ini banyak sampai 6,2 juta kalau tidak ada nilai tambahnya kan sayang, percuma karena itu perlu kita atur, dalam momentum itulah ke depan momentum perubahan undang-undang itulah saya menunggu supaya segala bentuk ketumpangtindihan dan kesimpangsiuran masalah ini kita selesaikan termasuk masalah ABK, ABK nelayan ini kemarin saya di demo karena memang yang mati banyak, saya ke Taiwan itu melihat 5 orang ABK kita itu tangannya putus, jari-jarinya, kenapa? Karena dia orang Cianjur orang gunung, orang Bogor orang gunung disuruh bekerja di laut, beda kalau orang Batak, orang pekalongan, orang tegal sudah biasa di laut, orang Demak juga biasa di laut, ini orang gunung suruh bekerja di laut tidak terbiasa semua, baca tulis tidak bisa, usut punya usut sebelum berangkat tidak mempunyai standar kompetensi, karena itu saya tunda sebentar 1 bulan, di demo kita tetapi dalam rangka itu datanglah orang perhubungan datang, akhirnya terjadi kesepakatan pengiriman ABK harus mempunyai dobel ijin, pertama adalah ijin PPTKIS, yang kedua adalah wajib mempunyai ijin selupak yang syarat-syarat kelautan, bagi TKInya dia wajib tiga standar, standar pertama wajib BST standar kepelautan, kalau dia nelayan BSTF standar nelayan dilatih. Saya kemarin waktu rapat saya tanya berapa kali untuk bisa mendapatkan BST? Pelatihan 10 hari, berapa hari untuk KKP pelatihan BSTF? 18 hari ikut pelatihan, sampai biayanya kita hitung, nah ini belum putus, kita ingin puter lalu *brainstorming*, kemarin

kami tuan rumahnya, minggu ini tuan rumahnya kelautan, minggu depannya lagi tuan rumahnya perhubungan, terakhir di Tenaga Kerja harus sudah putus saya bilang, sudah kita puter seperti ini masih belum putus, moga-moga arahnya kesana Pak, jadi BST, BSTF dan TKInya wajib ikut standar TKI kita, cuman tidak jadi masalah nanti dan kontraknya harus jelas, tidak kayak kejadian saya sudah paham yang dimaksud Ibu Irma, kejadian banyak, hampir tiap hari ABK ini jadi masalah.

Terus yang hukuman mati, tadi masalah perlindungan. Bagaimana cara kita melakukan? Lebih Pak, tidak hanya itu hukuman mati, data kita yang hukuman mati baik Malaysia maupun yang Arab Saudi 259 orang dan tahun ini ada 2 yang akan di eksekusi, agak ramai nanti tahun ini. Nah, kita sedang berupaya satu, nota diplomatik sudah, ketika Pak Jusuf Kalla kemarin datang kesana waktu takjiah Raja Abdulah sudah meminta kepada Raja Salman yang baru untuk dieksekusi, mohon maaf maksudnya untuk diampuni, kita minta tolong sama Alumni-alumni Timur Tengah termasuk mohon maaf kolega kita juga mantan Ketua MPR RI kita mintai tolong juga, semua tokoh yang mempunyai pengaruh di Arab Saudi kita mintai tolong, yang kasus ini tetap tidak bisa yang 2 orang ini, jadi jangankan untuk ketemu minta maaf, nemuin saja tidak mau, saya sudah tidak mau berhubungan dengan orang Indonesia, ini adalah kasus dimana TKI kita membunuh anaknya kecil karena gagal mendapatkan informasi pembunuhan itu majikannya itu kemudian ...*(tidak jelas)*...buru-buru nabrak orang, yang ditabrak mati lagi beruntun, nah artinya sudah tidak bisa lagi, nah kalau yang lain-lain masih bisa tetapi yang dua ini tidak bisa. Jadi, kita sudah nota diplomatik sampai Presiden turun tangan, sampai Presiden telepon, pendekatan keluarga, ke mahkamah dan sebagainya, sampai mohon maaf ini wartawan *off the record* ya karena ini*(rekaman terputus)*...kalau di Malaysia statusnya itu kontraknya tidak jelas, dijanjikan ini sama ini kemudian kalau di Arab Saudi putus komunikasi, kenapa putus komunikasi? Karena pendekatan kafalah itu dimana TKI kita sudah menjadi penguasaan orang lain, majikannya menguasai.

Saya kira itu Pak yang bisa kami sampaikan termasuk yang masalah tadi, kemudian masalah TKI purna tadi pemberdayaan, kita akan main di 55 kabupaten kota dan ini yang kemarin jalan di Garut itu baru *take off* masih pemanasan, belum, memang yang serius kapan? Yang serius tunggu partisipasi dan monitoring Bapak dan Ibu sekalian juga begitu, masih pemanasanlah. Ini lanjut Mas dari atas, ini 55 besar daerah-daerah TKI, kantong-kantong TKI yang akan kita main disini, jadi silakan kalau mau memonitor ada disini mulai dari Indramayu, Lombok Timur lanjut terus, Jawa Tengah mana? Pati ada tidak? Pati nomer 18, Tegal, Banyumas, Serang, Lampung Timur, Majalengka, silakan kalau mau ambil datanya untuk komunikasi, melihat silakan. Pada prinsipnya begini Pak, kita undang semua mitra lokal untuk berpartisipasi disini, kami undang *migran care*, kami undang ICA untuk terlibat, kami undang muslimat, kami undang fatayat, kami undang teman-teman Majelis Pelayanan Sosial Muhammadiyah, kami undang Fifa Foundation, SBMI semua kita undang, teman-teman yang menjadi lapangan *stakeholder* yang tidak kenal saja kita undang untuk partisipasi, apalagi Teman-teman yang kita kenal dan kita pada satu sisi melihat yang penting koridornya outputnya ini dan sebagainya. Kata kuncinya adalah *off taken* dan semua lembaga keuangan

terutama Bank, yang terakhir ini tadi sekaligus Ibu Anggraini bagaimana cara mengundang? *Alhamdulillah* Bu, ini sejak kita umumkan di website layanan keuangan terpadu yang berpartisipasi sudah ada hampir 10 proposal Bank-bank BUMN maupun swasta yang masuk yaitu BRI, Mandiri, BNI, Bukopin, Permata, BII Mybank masuk, Sinar Mas masuk, jadi semua sudah pada masuk karena kita buka semua dan Lembaga-lembaga yang semula berdiri itu menjadi partisipasi semua menggandeng perbankan dan saya yakin ke depan remitansinya akan baik dan murah, dibanding pada level sebelumnya dan sampai ke badan *support* betul sama Bapak Menko Perekonomian. Nah, silakan kalau mau ikut memonitor, kita libatkan memonitor pada level ini, tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita ingin banyak partisipasi dari semua pihak, dari masyarakat, kami sadar, saya tidak mungkin bisa mengatasi TKI sebanyak ini, mumet kepala, karena itu kami juga ingin membagi kemumetan itu kepada Teman-teman yang lain.

Saya kira itu Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Pak Imam silakan.

F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos, SH.,MM) :

Pendalaman sedikit.

Terima kasih Pimpinan dan Teman-teman Komisi IX DPR RI yang saya hormati.

Kepala BNP2TKI dan jajarannya, Pak Nusron.

Pak Nusron, intinya saya terima kasih ya paparannya, jawabannya yang begitu pakai pergerakan tangan dan mulutnya yang memantapkan kita-kita Komisi IX DPR RI, tadi kan *panjenengan* bilang ..(*Bahasa Jawa*)...saya bantu mikir Pak, Teman-teman tadi kan banyak yang complain itu dari Bu Siti apa, sosialisasinya kurang, memang kalau sosialisasi kurang padahal *panjenengan* itu niatnya baik contohnya TKI purna itu niatnya baik, tetapi karena sosialisasinya kurang terjadi complain, ada ...(*tidak jelas*).... 1000 lebih dan sebagainya karena kurang sosialisasi, maksudnya begini Pak, di kelurahan atau di kabupaten itu ada 40an setiap 40 hari sekali mula-mula timbul ditabiat oleh bupati masing-masing, maksud saya panjenengan bisa menugaskan provinsi ya BNP2 Provinsi atau BP3TKI itu misalnya sudah kesana sambil sosialisasi program saya, seperti yang tadi ada ...(*tidak jelas*)...terus program panjenengan itu saya sarankan dibinakan. Misalnya DPR RI sejak awal tidak masalah juga, itu saran saya juga. Yang kedua, ini masih ada calo-calo yang bergentayangan, jadi dia tidak melakukan pelatihan dan seterusnya dan seterusnya tetapi langsung dibawa ke Singapura atau ke Taiwan, ini yang menjadi kasus, seperti kasus Suponilo itu yang tahu-tahu membunuh karena dia tidak pelatihan dulu, itu masih, BNP2TKI saya tahu tidak ada setengah trilion makanya pengawasannya tidak ada. Nah, ini mesti kerja sama dengan Naker dan Kepolisian setempat yang kaitannya dengan calo-

calo itu mengurangi kasus-kasus. Jadi, itu Pak yang ingin saya sampaikan, jadi intinya 40 an itu panjenengan manfaatkan untuk sosialisasi.

Kemudian yang kedua, PPTKIS itu ada yang baik, ada yang tidak baik, menurut saya silakan disikat yang tidak baik, yang ilegal tetapi yang baik-baik itu ditaatkan, dimaksimumkan, bahkan ada keluhan juga ini Pak Nusron katanya dia itu mau perpanjangan dipersulit karena ada informasi tidak ada TKI yang bekerja di luar negeri padahal mereka sudah *enjoy* dan seterusnya artinya itu tidak kasus, kalau yang kasus-kasus silakan di stop, itu dari kami Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Imam.
Sekarang kita coba tayangkan kesimpulan.

F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH.,M.Hum) :

Ketua.

KETUA RAPAT :

Masih ada?

F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH.,M.Hum) :

Saya hanya minta supaya yang tadi ditayangkan tidak semua masuk itu supaya dicopykan ke kita, yang tadi terakhir. Oh ada semua ya? Tetapi tadi saya lihat, ada semua?

KEPALA BNP2TKI :

Oh memang ada yang diluar kontek tadi, yang angka-angka tadi ya?

F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH.,M.Hum) :

Saya kira perlu juga kami dapatkan.

KEPALA BNP2TKI :

Yang angka sama yang *up skill* tadi itu.

KETUA RAPAT :

Oke, kita langsung ke kesimpulan ya, karena dengan Pak Nusron ini tidak boleh terlalu lama-lama nanti kita kayak dihipnotis begitu, ada ilmu tersendiri juga Beliau ini kelihatannya, jadi cukup dipersingkat saja jangan terlalu lama-lama.

Ini saya bacakan ya draft kesimpulan.

Draft Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Selasa 14 April 2015 :

1. Komisi IX DPR RI mendorong BNP2TKI agar segera mempercepat biaya yang sampai saat ini belum ditetapkan sehingga ada kejelasan

besaran biaya yang menjadi beban TKI untuk segera disosialisasikan pada pihak-pihak terkait.

2. Terkait pendataan TKI yang masih simpang siur, Komisi IX DPR RI meminta BNP2TKI untuk melakukan peningkatan, penyempurnaan dan pengawasan terhadap sistem online dan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.
3. Komisi IX DPR RI mendorong BNP2TKI untuk meningkatkan sistem informasi TKI luar negeri yang optimal sehingga mampu memberikan informasi yang akurat kepada TKI, keluarga TKI maupun pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk :
 - a. Memberikan pengawasan yang komprehensif terhadap permasalahan yang dialami TKI pelaut dengan melibatkan Kementerian Perhubungan RI.
 - b. Menyiapkan langkah dan program strategis dalam upaya menanggulangi kondisi sosial, ekonomi TKI yang pulang sementara dari Yaman.
 - c. Mengidentifikasi jenis pekerjaan TKI diluar negeri sebagai bagian perlindungan bekerja sama dengan Menaker RI, Kemenlu RI dan Pemerintah Daerah.
 - d. Memberikan mediasi dan advokasi mulai dari pra penempatan, penempatan dan purna penempatan sehingga tidak menunggu ada masalah terlebih dahulu.

Saya pikir itu ada 4 (empat) kesimpulan, kita mulai dari nomer 1, ada yang mau sumbang saran silakan. Nanti kita mulai ketok satu per satu.

KEPALA BNP2TKI :

Pak, mohon ijin.

Yang nomer 1 ini begini Pak, kami ini sudah cepat Pak, sudah mengusulkan ini tetapi yang memutuskan bukan kami Pak soal struktur biaya ini Pak, kami sudah mengirim surat itu per tanggal 13 Desember 2014 dengan konsep rincian yang kami sampaikan tadi itu Pak, tetapi ini LITnya di Pak Menteri, jadi kami minta kalau memang untuk hal ini dimasukkan agar BNP2TKI segera bekerja sama dengan Kemenaker untuk mempercepat ini, dari rapat ini saya sebagai modal untuk menagih rapat kepada mereka begitu.

KETUA RAPAT :

Karena Bapak didesak oleh Komisi IX DPR RI.

KEPALA BNP2TKI :

Di desak oleh Komisi IX DPR RI.

KETUA RAPAT :

Pernah buat kesimpulan juga kayaknya Pak ya?

KEPALA BNP2TKI :

Ya Pak.

KETUA RAPAT :

Jadi pas betul.

KEPALA BNP2TKI :

Karena ini Pak, ceritanya ini justru muncul ketika dibluskan waktu itu kemudian Presiden memerintah, saya janji pada Presiden 1 bulan, sebelum 1 bulan saya selesaikan, ternyata yang memutuskan adalah di Menteri begitu Pak.

KETUA RAPAT :

Oke, jadi nomer 1 kita masukkan Kementerian Tenaga Kerja RI, nanti berdua ya Pak, oke modal awal sudah kita berikan. Kira-kira ada masukkan lain nomer 1?

F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH.,M.Hum) :

Mendorong itu mendesak.

KETUA RAPAT :

Oke, mendesak.
Silakan Pak.

F-PG (H. BUDI SUPRIYANTO, SH.,MH) :

Terima kasih.

Tetapi mendengarkan dari Bapak Kepala Badan terutama ada semacam ketakutan tentang adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja berkaitan dengan jenis-jenis pekerjaan tadi ya, ini toh sudah disampaikan kepada kita, nah sehingga jangan sampai itu terjadi ya kan? Jangan sampai nanti ada temuan BPK hanya karena masalah aturan, nah ini tentunya kita masukkan di dalam kesimpulan, ini kan masalah yang dihadapi oleh BNP2TKI, tolong juga disimpulkan berkaitan tadi juga sama Pak, kalau misalnya ini masalah poin nomer 1, ini kan juga ternyata berkaitan dengan Menaker, lah ini mungkin ada dua yang bisa kemudian kita sandingkan tadi dengan kekhawatiran dari Kepala Badan, jangan-jangan besok menjadi temuan, nah ini harus kita tindaklanjuti, itu sudah kita sampaikan, kalau kita tidak ...*(tidak jelas)*... lucu..

KETUA RAPAT :

Begini Pak, nanti dibuatkan saja satu kesimpulan lagi. Jadi, ini yang nomer 1 kita sepakati ya? Mungkin kesimpulan nomer 5 kali ya? Nomer 1 setuju?

F-PDIP (ABIDIN FIKRI, SH) :

Pimpinan, usul saja Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Ya silakan.

F-PDIP (ABIDIN FIKRI, SH) :

Yang berkaitan dengan urusannya dengan Tenaga Kerja itu di poin 1, misalkan Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI agar segera bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk satu, dua begitu sehingga mempercepat, jadi biar agak mempermudah.

Terima kasih.

F-PDIP (DANIEL LUMBAN TOBING) :

Pimpinan, saya pikir begini ini kalau dibilang agar segera bekerja sama seakan-akan belum bekerja sama. Saya pikir langsung saja *mendesak BNP2TKI dan Kementerian atau BNP2TKI bersama Kementerian Tenaga Kerja*, jadi jangan agar segera lagi, supaya mereka ini benar-benar dua institusi ini langsung memutuskan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Tolong langsung ya a, mempercepat penetapan struktur. b, tadi yang Bapak kita itu?

KEPALA BNP2TKI :

Yang b itu begini Pak Ketua mohon ijin.

KETUA RAPAT :

Silakan.

KEPALA BNP2TKI :

Di dalam Permenaker itu kan tidak ada masa transisi, begitu diputuskan tanggal 1 Januari 2014 berlaku pada saat itu, lah sementara selama bulan Januari sampai Maret, sampai April ini *job order* yang ada itu adalah *job order* yang tidak seperti itu masih yang lama Pak, masih pembantu dan sebagainya. Tiga bulan ini dimana, karena memang kurikulumnya tidak ada, ininya tidak ada, itunya tidak ada tetapi di dalam peraturannya itu tidak ada jeda masa transisi, nah itu saya mohon kalau itu memang mau dimasukkan pertama ya kalau bisa Permenaker itu memberi masa transisi, sampai kapan? Sambil mempersiapkan kurikulum, instruktur sama asesor untuk melakukan itu, begitu Pak.

KETUA RAPAT :

Terkait keluarnya keputusan Menteri Tenaga Kerja No.1 Peraturan ya, *terkait keluarnya Peraturan Menteri*, keputusan Menteri? Oh betul berarti, apa itu Pak? Tentang? Coba dibantu Pak, *terkait keluarnya keputusan Menteri Tenaga Kerja No.1 Tahun 2015 tentang jabatan yang dapat diduduki...*

KEPALA BNP2TKI :

Diduduki oleh TKI diluar negeri.

KETUA RAPAT :

Diluar negeri, oke.

KEPALA BNP2TKI :

Semangatnya bagus, cuman transisinya ini loh mempersiapkan ini.

F-PKB (Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA) :

Interupsi Ketua, kanan.

Saya perlu cross cek saja, kemarin kita waktu Raker itu sepertinya hari ini sudah di salah satu kesimpulan, mungkin coba di...nomer 1 sepertinya sudah di kesimpulan kemarin.

KETUA RAPAT :

Coba TA masuk tidak kemarin? Ini judulnya ya *Terkait keluarnya keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomer 1 Tahun 2015 tentang jabatan yang dapat diduduki oleh TKI di luar negeri untuk pekerjaan domestik, agar penerapannya diberikan masa transisi sambil mempersiapkan kurikulum, instruktur dan asesor* ya Pak?

Oke, titik ya.

Oke, kira-kira begitu ya?

Mungkin ada masukkan lagi? Cukup ya? Boleh kita ketok ya Pak Kepala?

(RAPAT : SETUJU)

F-PDIP (ABIDIN FIKRI, SH) :

Pimpinan, satu hal lagi yang berkaitan dengan PSIP, Tadi Pak Kepala menyatakan belum ada kordinasi dengan Kementerian Luar Negeri yang berkaitan dengan imigrasi.

KEPALA BNP2TKI :

Koordinasi luar negeri sudah mendukung, yang imigrasi Pak yang menolak.

F-PDIP (ABIDIN FIKRI, SH) :

Nah, justru itu kalau karena itu menurut Kepala memang diperlukan dalam kesimpulan ya harus dimasukkan.pengawasan.

KEPALA BNP2TKI :

Dengan senang hati Pak. Imigrasi itu dia punya

KETUA RAPAT :

Tetapi begini Pak, imigrasi itu dia punya sistem sendiri karena kaitannya bukan hanya dengan tenaga kerja, dengan turis yang menggunakan visa turis tetapi kalau tidak salah dia punya sistem sendiri kalau imigrasi itu.

F-PDIP (ABIDIN FIKRI, SH) :

Justru itu, justru itu kalau dikoordinasikan secara baik berkaitan penempatan tenaga kerja akan lebih baik.

F-PG (H. BUDI SUPRIYANTO, SH.,MH) :

Barangkali usulan Pimpinan.

Menlu, BNP2TKI, Naker dan Menkumham dalam hal ini Imigrasi pernah kita melakukan Rapat Kerja bersama bahas suatu masalah termasuk kalau ini perlu ya kita panggil semua, jadi biar sinergi biar persoalan cepat selesai, karena kita juga berkali-kali mengadakan Rapat bareng-bareng begitu, ini Menkumham pernah, Menlu pernah..

KETUA RAPAT :

Mungkin nanti kita usulkan Rapat Kerja dulu Pak, karena orangnya belum ada ini, jadi kita masukkan kesimpulan nanti kan sepihak kita, mungkin kita usulkan nanti ada Rapat Kerja, bisa juga disimpulkan disini agar ada usulan Rapat Kerja antar apa tadi? Menlu, Menkumham, Menaker, nanti kita minta ijin ke Komisi terkait, mungkin itu boleh dimasukkan kesimpulan tidak apa-apa, biar rame nanti. Bintangnya tetap Kepala BNP2TKI.

KEPALA BNP2TKI :

Bintangnya Menkumham Pak, karena ngasih SK Pak.

KETUA RAPAT :

Rapat gabungan, ini inspirasi kemarin tidak timbul, gara-gara Pak Nusron jadi tambah ini, Bapak itu membawa inspirasi baru rupanya, tanda-tandanya sudah ada, mudah-mudahan reshuffle cepat.

KEPALA BNP2TKI :

Nunggu PAN Pak.

KETUA RAPAT :

Oke, kita tambah 2, *Komisi IX DPR RI mengagendakan Rapat Gabungan terkait masalah TKI di luar negeri dengan BNP2TKI, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan Ham RI...*

F-PDIP (ABIDIN FIKRI, SH) :

Dengan Kepolisian Republik Indonesia.

KETUA RAPAT :

Nambah *dengan Kepolisian Republik Indonesia*, tambah lagi. Saya pikir cukup itu ya kalau kita putuskan sesuatu tentang TKI, itu pas ya.

KEPALA BNP2TKI :

Subyeknya spesifik Pak, masalah penanganan ilegal, masalah imigrasi.

KETUA RAPAT :

Nanti kita siapkan betul bahannya, tolong kita dibantu bahannya Pak, memperlancar urusan CEO tenaga kerja ya.

KEPALA BNP2TKI :

Tetapi Pak Asman menjadi Komisarisnya.

F-PDIP (ABIDIN FIKRI, SH) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Ya silakan.

F-PDIP (ABIDIN FIKRI, SH) :

Ini kan berkaitan dengan pembentukan PTSP, yang disampaikan oleh Pak Kepala kan baru dua PTSP kan? Tiga.

KEPALA BNP2TKI :

Yang sudah jalan satu, minus imigrasi, yang akan jalan pada bulan depan ini dua yaitu Jawa Tengah sama Jawa Timur.

F-PDIP (ABIDIN FIKRI, SH) :

Targetnya Kepala berapa PTSP itu?

KEPALA BNP2TKI :

Di semua Pak, tetapi tahun ini minimal tahun ini tambah Bandung, Jakarta, Lampung Pak, minimal tahun ini.

F-PDIP (ABIDIN FIKRI, SH) :

Saya kira kalau sudah sinergi itu bisa cepat menurut saya Pimpinan.
Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Jadi kita tambah TKI PTSP begitu ya? Benar ya Bu istilahnya begini? PTSP begitu sudah benar ya?

Boleh kita ketok kesimpulan nomer 2 ini?

Bissmillah.

(RAPAT : SETUJU)

Sekarang nomer 3, *Terkait pendataan TKI yang masih simpang siur, Komisi IX DPR RI meminta BNP2TKI untuk melakukan peningkatan, penyempurnaan dan pengawasan terhadap sistem online dan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.*

Ini tugasnya Bapak sebenarnya. Siap Pak ya ini? Kita ketok ya?

(RAPAT : SETUJU)

Nomer 4, *Komisi IX DPR RI mendorong BNP2TKI untuk meningkatkan sistem informasi TKI luar negeri yang optimal sehingga mampu memberikan informasi yang akurat kepada TKI, keluarga TKI maupun pihak-pihak yang berkepentingan.*

Ini tugas lagi, termasuk sosialisasi ini sebenarnya, oke ya?

F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos, SH.,MM) :

Sebelah kanan Pak Ketua.

Saya setuju masukkan sosialisasi termasuk memanfaatkan 40an itu murah meriah tetapi masuk, untuk sosialisasi biar saudara-saudaranya dan yang lainnya tidak jadi masalah, itu dimasukkan ke sosialisasi, sosialisasi kalau tidak ada wadahnya tidak akan bisa Pak, ini kan mumpung ada lurah banyak per kabupaten, maksudnya dimasukkan seperti itu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Jadi melibatkan?

F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos, SH.,MM) :

40 an Lurah-lurah itu kumpul di kabupaten itu Pak, itu kan setiap 40 hari ada itu. Nah, disitu sosialisasi sebagai salah satu contoh saja.

KETUA RAPAT :

Ya artinya kesimpulan ini adalah salah satu yang diusulkan ya? Tetapi kesimpulan tetap begini ya? Cukup ya? Boleh kita ketok ya?

(RAPAT : SETUJU)

Oke.

Tadi sudah saya bacakan, kira-kira ada tambahan atau kita setuju?

Silakan.

KEPALA BNP2TKI :

Untuk yang poin a Pak, itu melibatkan Kementerian Perhubungan dan Kelautan Pak karena untuk yang nelayan Pak. Kalau yang Perhubungan itu semua kapal, kan kapal ada dua, kapal niaga sama kapal laut, kapal ikan, kalau yang kelautan khusus yang ikan.

KETUA RAPAT :

Kementerian Perikanan dan Kelautan bukan? Kelautan dan Perikanan? Kebalik lagi, oke. Boleh kita ketok ini? *Bissmillahirrahmanirrahim*, kita ketok.

(RAPAT : SETUJU)

Selesai ya Pak Menteri, eh Pak Menteri....

KEPALA BNP2TKI :

Yang Yaman Pak.

KETUA RAPAT :

Oh masih.

KEPALA BNP2TKI :

Pak, begini Yaman itu TKI kita yang ada 1500 orang itu yang 1200 adalah karyawan Medco sudah pulang semua, yang 315 orang itu ABK sedang *moving* entah dimana, yang ada di Yaman hanya 32 orang dan sudah pulang rombongan wanita, jadi untuk kontak TKI di Yaman ini *halas* kalau bahasanya Habib Mahir itu, jadi kalau bisa di drop saja poin b Pak. Mohon ijin Pak.

KETUA RAPAT :

Tidak usah pakai yang a lagi itu, oh yang bawahnya jadi b ya. Oh c masih ada, tadi sudah saya bacakan, ini memang wajib itu. Jadi, kesimpulan nomer 5 kita ketok ya?

(RAPAT : SETUJU)

Oke, pas ini sebelum jam 5 selesai ya, tergantung aktornya.

Terima kasih.

Saya pikir terakhir kita berikan waktu kepada Pak Kepala BNP2TKI untuk *closing statement*.

Silakan.

KEPALA BNP2TKI :

Pertama-tama, kami mengucapkan syukur *alhamdulillah* dan atas atensi dan partisipasinya, yang kedua, saya sekaligus mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekhilafan terutama yang masalah kegiatan-kegiatan yang ada di Daerah-daerah pemilihan Bapak dan Ibu sekalian akan segera kami koordinasikan dan memang yang berjalan baru beberapa dan In Shaa Allah dengan adanya kemitraan ini akan ada pengawasan berintegrasi yang lebih baik dan lebih cepat.

Saya kira itu Pak.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam.

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil alamin*, kita tutup rapat hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, buat Bangsa dan Negara kita.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.55 WIB)

Jakarta,14 April 2015

a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT,

Ttd,

MUH. YUS IQBAL, SE

NIP. 196707171993031006